



# **PARTISIPASI POLITIK WANITA MUSLIM**

**Oleh**  
**Akhtim Wahyuni**

**IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Aktif di dunia politik bagi wanita sebagaimana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, sebenarnya bukan persoalan yang tidak bermasalah. Polemik tentang keterlibatan wanita dalam politik telah berlangsung sejak lama. Sebagian kelompok menganggap bahwa keterlibatan wanita di dunia politik merupakan hal yang biasa, sedang sebagian lainnya menganggap bahwa hal itu melanggar norma dan kodrat wanita.

Masih up to date dalam pemberitaan di Indonesia tentang tarik menarik peran wanita di kancah politik, ketika partai PDI Perjuangan memimpin hasil perolehan suara pada pemilu 1999. Partai yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri ini, menetapkan satu konsensus dengan mencalonkan Megawati menjadi calon tunggal Presiden RI. Di sinilah polemik boleh tidaknya wanita memimpin negara meruncing. Diskusi-diskusi baik dalam skala besar maupun kecil banyak digelar untuk membicarakan boleh tidaknya Mega menjadi Presiden. Di antaranya, Partai Persatuan Pembangunan dalam rapat pimpinan secara resmi menyebutkan tidak akan memilih presiden wanita. Sebaiknya, rapim merekomendasikan, presiden yang tepat untuk presiden Indonesia haruslah putra terbaik bangsa yang beragama Islam. Keputusan ini telah menjadi fatwa ulama' di PPP, demikian tegas Ketua

Umum PPP Hamzah Haz.<sup>1</sup> Demikian juga dengan Partai Kebangkitan Bangsa, dalam tubuh partai ini masih ada pandangan tidak setuju terhadap presiden wanita. Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa Megawati melalui PDI Perjuangan, ternyata banyak didukung rakyat. Alwi Shihab selanjutnya menegaskan, bahwa para kiai bukan tidak setuju terhadap Megawati, tetapi soal wanitanya.<sup>2</sup> Ini menunjukkan betapa masih beragamnya pemikiran masyarakat Indonesia dalam memposisikan peran wanita.

Politik sebagai segmen publik yang berkaitan dengan kekuasaan, semenjak dahulu dikaitkan dengan dunia laki-laki dan seakan menjadi wilayah terlarang untuk dimasuki wanita. Hal ini disebabkan budaya masyarakat telah membentuk dan menekankan wanita untuk berperan dalam lingkungan domestik saja. Walaupun ada beberapa nama wanita yang aktif di sektor publik atau organisasi, posisi mereka tidak begitu dominan dalam organisasi tersebut. Ada peranan spesial yang diperuntukkan bagi wanita yang aktif di organisasi, salah satunya sekretaris adalah posisi yang layak untuknya<sup>3</sup> dan ini hampir terjadi di seluruh organisasi di Indonesia.

Ada beberapa alasan yang menjadi pemicu bangkitnya wanita Indonesia, diantaranya, kesadaran posisi yang ter subordinasikan, atau terinspirasi oleh gerakan feminisme yang menyuarakan equality dengan laki-laki, atau pemahaman

---

<sup>1</sup> Jawa Pos, tanggal 16 Juni 1999

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Mandy Macdonald et.al, *Gender and Organizational Change; Bridging the Gap between Policy and Practice* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1997), 32

keagamaan dan kesadaran sejarah mereka yang cenderung membaik.<sup>4</sup> Beberapa alasan tersebut berdampak pada meningkatnya angka kemajuan yang cukup berarti bagi keterlibatan wanita di dunia publik yang tidak hanya sebagai partisipan yang suaranya tidak layak diperhitungkan. Kesungguhan wanita untuk terlibat di sektor publik dibuktikan dengan kemampuan mereka untuk dapat menduduki pos-pos penting di kancah publik.

Keterlibatan wanita Indonesia dalam politik, sebenarnya bukan hal baru, karena banyak wanita yang telah turut serta secara aktif dalam pergerakan kebanggaan. Sebelum datangnya kolonialisme beberapa nama yang terlibat dalam sejarah politik bangsa, seperti Sultanah Sri Ratu Alam Safiatuddin Johan Berdaulat yang dinobatkan memerintah Aceh pada tahun 1641-1675. Beberapa tokoh lainnya adalah Tribuwanatunga Dewi, Maria Walandaw Maramis, Rahmah El Yunisiah untuk menyebutkan beberapa contoh saja.<sup>5</sup>

Kolonialisme telah melahirkan organisasi-organisasi kebangsaan baik yang bersifat kooperatif seperti Budi Utomo pada tahun 1908 ataupun yang nonkooperatif seperti Partai Nasional Indonesia pada 1927. Baik secara langsung maupun tidak langsung, rangkaian peristiwa sejarah tersebut telah membawa pengaruh besar terhadap keterlibatan wanita Indonesia dalam perjuangan bangsa. Sejak saat itulah organisasi wanita bertumbuhan. Putri Mardika adalah organisasi wanita pertama yang berdiri pada tahun 1912 di Jakarta. Kemudian diikuti oleh

---

<sup>4</sup> Sukarti Suryocondro, "Timbulnya Perkembangan Gerakan Wanita Indonesia", dalam Kajian Wanita dalam Pembangunan, ed. T.O. Ihromi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 30.

<sup>5</sup> KOWANI, Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, tt), 2-18.

beberapa organisasi seperti Keutamaan Istri di Tasikmalaya pada tahun 1913, Wanito Susilo pada tahun 1918 di Palembang, dan beberapa lainnya Organisasi-organisasi tersebut hanyalah bergerak di bidang politik.<sup>6</sup>

Kesadaran politik wanita Indonesia telah melahirkan Kongres Wanita Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada 22 Desember 1928. Kongres demi kongres berlangsung sampai Indonesia merdeka. Para tokoh wanita yang terlibat dalam organisasi kewanitaan memperjuangkan hak pilih dalam kongres yang ke-2. Pandangan wanita tidak pantas berpolitik berubah ketika pada tahun 1941 pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi *Visman* untuk menyelidiki keinginan bangsa Indonesia mengenai perubahan ketatanegaraan. Ada wanita yang pada saat itu mengajukan tuntutan Indonesia berparlemen yaitu Nyonya Sunaryo Mangunpuspito dan Nyonya Sri Mangunsarkoro dengan tuntutan Indonesia merdeka.<sup>7</sup>

Peristiwa tersebut merupakan langkah maju yang besar karena aspirasi politik menyentuh para wanita pada saat itu. Sejak saat itu, kongres demi kongres, gaung politik disuarakan oleh organisasi-organisasi wanita tersebut. Pada masa pendudukan Jepang pun wanita tetap berperan dalam politik dan wadah bagi mereka adalah Fujinkai. Kekalahan Jepang telah mengakhiri semua organisasi politik termasuk Fujinkai juga turut dibubarkan.

Wadah organisasi wanita pada masa Indonesia merdeka diganti dengan Persatuan Wanita Indonesia (Perwari) dan Wanita Negara Indonesia (Wani). Pada

---

<sup>6</sup> Ibid., 19.

<sup>7</sup> Ibid., 30-33.

bulan Desember 1945 dalam konferensinya di Klaten, kedua organisasi wanita tersebut difusikan dengan nama Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Pada bulan Februari 1946 lahirlah Badan Kongres Wanita (Kowani). Badan ini merupakan wadah bagi semua organisasi wanita yang ada pada waktu itu dan masih tetap menjalankan fungsinya sampai sekarang.

Wanita Indonesia, secara hukum dan undang-undang, tidak menjumpai halangan yang begitu keras karena begitu Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945, wanita Indonesia telah menerima hak-haknya sebagai wanita yang utuh. Implementasi yang nyata bagi wanita Indonesia dalam bidang politik adalah pemilu 1955, di mana perempuan yang memenuhi persyaratan telah ikut serta dalam kegiatan politik yang sangat berarti itu. Sejak saat itu pula partisipasi wanita dalam lembaga pemerintahan dari yang rendah sampai yang tinggi serta berkecimpungnya mereka dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik tidak lagi merupakan hal yang aneh.<sup>8</sup>

Perjuangan kaum wanita Indonesia tidak berhenti sampai disitu saja Upaya-upaya perbaikan untuk memberdayakan wanita secara maksimal senantiasa dilakukan. Hasil nyata yang dapat dipetik dari upaya-upaya tersebut dapat dinikmati kaum wanita, tidak hanya terbatas pada keikutsertaannya sebagai pemilih tapi mereka juga berhak dipilih. Menangnya PDIP yang dipimpin seorang wanita dalam pesta demokrasi 1999 adalah salah satu bukti terbukanya iklim politik bagi wanita Indonesia.

---

<sup>8</sup> Sukarti, *Timbulnya Perkembangan*, 64.

Tidak hanya itu, munculnya sejumlah kontestan partai politik yang meramaikan pesta demokrasi di Indonesia baru-baru ini, semakin membuka peluang kaum wanita untuk berpartisipasi dalam kancah politik. Wanita-wanita muslim pun tidak segan lagi melibatkan diri dalam dunia politik yang selama ini tabu bagi mereka. Terlebih-lebih adanya beberapa partai politik yang mengafiliasikan diri sebagai partai politik yang berazaskan Islam tidak ada alasan bagi wanita muslim untuk tidak terlibat di dalamnya. Jadi tidak mengherankan jika pada saat ini dijumpai kaum wanita yang vokal dalam menyuarakan keadilan bagi kaumnya lewat berbagai lembaga politik. Ini memperkuat asumsi bahwa telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam hal partisipasi wanita muslim dalam dunia politik. Hasil akhir sementara yang dapat diperhitungkan saat ini adalah munculnya nama-nama politisi wanita muslim yang mewarnai dinamika perpolitikan di Indonesia. Beberapa contoh di antaranya, Khofifah Indar Parawansa politisi wanita muslim yang aktif di Partai Kebangkitan Bangsa dan pada saat ini menjabat sebagai menteri Urusan Pemberdayaan Perempuan, Aisyah Amini mewakili Partai Persatuan Pembangunan selama beberapa pergantian kabinet menjadi anggota DPR/MPR, dan Marwah Daud Ibrahim yang aktif di Golongan Karya, Nurdianti Akma yang aktif di Partai Amanat Nasional dan saat ini masuk sebagai anggota DPR/MPR RI.

## **B. Rumusan Masalah**



Berdasarkan uraian dan asumsi di atas, maka penelitian ini memfokuskan kajiannya untuk menjawab permasalahan:

1. Bagaimana kondisi umum wanita muslim yang berpartisipasi politik di Surabaya?
2. Apa tujuan partisipasi politik wanita muslim di Surabaya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik tersebut?
3. Bagaimana partisipasi politik wanita muslim di Surabaya?

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penulisan tesis ini tidak bias, maka fokus kajian penelitian ini penulis batasi. Pembahasan tentang partisipasi politik wanita muslim adalah partisipasi politik wanita muslim yang terlibat dan aktif dalam organisasi politik. Indikasi dari partisipasi wanita muslim tersebut dilihat dari penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasi politik yang menjadi wadah politiknya, sehingga mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dari ragamnya partisipasi politik, penulis membatasi pada partisipasi politik wanita muslim yang menduduki jabatan politik atau administratif dalam organisasi politik.

Sedang wanita muslim yang penulis maksud adalah wanita muslim yang memiliki background keagamaan yang mapan. Indikasinya dapat diketahui partai yang mereka pilih. Maka asumsi awal penulis, partai-partai yang penulis jadikan sampel yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan

Bintang, dan Partai Persatuan Pembangunan cukup represenfatif untuk dijadikan sampel sebagai komunitas wanita muslim yang memiliki akar keagamaan yang kuat. Meskipun dua di antara partai tersebut tidak menyebut sebagai partai Islam, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional, namun dapat dilihat dari hasil pemilu 1999 mayoritas wanita muslim yang bergabung dengan partai tersebut adalah wanita muslim yang paham keagamaannya mapan.

#### **D. Penjelasan Judul**

Untuk menghindari disonansi kognitif dalam kajian penelitian ini, juga memperoleh bahasan penelitian yang lebih terarah, maka berikut ini peneliti paparkan penjelasan judul penelitian.

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>9</sup>

Dalam redaksi yang berbeda namun esensinya sama Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Herbert Mc Closky, "Political Participation", dalam Partisipasi dan Partai Politik, ed. Miriam Budiarjo (Jakarta: PT. Oramedia, 1981), 1.

<sup>10</sup> Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Nb Essay Choice: Political Participation in Development Countries* (Cambridge : Harvard University Press, 1977), 3.

Sedang yang dimaksud dengan wanita muslim adalah sebutan bagi wanita yang beragama Islam, yang dalam pengertian idealnya adalah wanita yang menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada ajaran agama Islam.<sup>11</sup>

Ajaran-ajaran Islam tersebut memuat antara lain, agar manusia beriman kepada Allah Yang Maha Esa, dengan malaikat-malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada para rasul-Nya, kepada hari akhirat, dan kepada takdir-Nya. Islam juga mengajarkan lima kewajiban pokok. Yaitu mengucapkan dua kalimat shahadat, sebagai pernyataan kesediaan hati menerima Islam sebagai agama, mendirikan sholat, membayar zakat, mengerjakan puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Selain itu Islam dikenal sebagai agama yang berjuang untuk menegakkan keadilan, persaudaraan, dan persamaan derajat manusia. Tidak ada kelebihan bagi yang berkulit putih dari yang berkulit hitam. Laki-laki dan perempuan diberi hak dan kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Bagi Islam, manusia yang baik derajatnya adalah manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling banyak berbuat yang bermanfaat bagi kemanusiaan, atau tegasnya yang paling bertakwa kepada Allah Swt.<sup>12</sup>

Jadi yang dimaksud dengan 'Partisipasi Politik Wanita Muslim' dalam judul penelitian ini adalah keikutsertaan secara sukarela wanita yang tunduk dan patuh terhadap ajaran Islam dalam mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang diapresiasi melalui partai politik.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, Ensiklopedi Islam, Jil. II (Jakarta tt, 1993), 811

<sup>12</sup> Ibid., 445.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Penentuan Objek Penelitian**

#### **a. Populasi dan Sampel**

Penelitian ini mengambil objek populasi partai-partai politik di Surabaya yang terfokus pada Dewan Pimpinan Daerah. Sedangkan sampel yang peneliti ambil dari jumlah partai-partai politik yang ada, meliputi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang. Jadi, teknik pengambilan sampel yang peneliti pakai adalah teknik purposive sampling. Alasan peneliti, karena partai-partai yang menjadi pilihan peneliti lebih mewakili untuk mengetahui partisipasi politik wanita muslim. Walaupun tidak menutup kemungkinan partai-partai lain, selain partai tersebut di atas juga menjadi wadah politik wanita muslim. Namun dari sinilah peneliti benar-benar ingin mengetahui background wanita muslim yang memilih partai-partai yang menjadi sampel penelitian sebagai wadah politik mereka, yang notabene partai-partai tersebut lebih cenderung untuk disebut partai Islam meskipun dua di antaranya (Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional) menganggap sebagai partai nasional yang terbuka bagi setiap golongan, tidak hanya untuk komunitas Islam. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah wanita-wanita muslim yang aktif di PKB, PBB, PAN, dan PPP, dengan jumlah 8 responden dari tiap-tiap sampel penelitian. Jadi, jumlah total responden penelitian ini sebanyak 32.

#### **b. Sumber dan Jenis Data**

Karena merupakan perpaduan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka, maka data-data yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi:

- 1). Data lapangan, berupa hasil wawancara dengan politisi-politisi wanita muslim yang aktif dalam partai yang menjadi sampel penelitian
- 2). Data kepustakaan, yang berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, jurnal, majalah, dokumen-dokumen yang signifikan dengan tema penelitian.

Untuk menjaga validitas data, diutamakan penggunaan data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder (dari sumber tidak langsung) juga masih dipakai setelah sebelumnya dilakukan verifikasi dan *cross-check* dengan data-data yang lain. Selain itu, penulis juga menggunakan data tersier (berupa kamus, ensiklopedi dan sumber lain). Kemudian untuk menjamin otentisitasnya, maka kutipan-kutipan diberikan catatan kaki (*footnote*), sedangkan hasil wawancara dan pengamatan ditranskrip kemudian disertakan keterangan waktu dan tempatnya dalam laporan penelitian.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan penelitian ini, akan dicari data-data di lapangan baik data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif dicari dengan menggunakan kuesioner yang sudah tersedia. Data yang bersifat kualitatif akan dicari lewat observasi terbatas. Alasan penggunaan teknik ini karena berdasarkan jenis penelitian yang dipakai, penelitian ini termasuk dalam lingkup paradigma fakta sosial. Fakta sosial dalam pandangan Durkheim hendaknya diposisikan sebagai 'sesuatu yang riil. Sedang tipe fakta sosial itu sendiri ada dua yaitu; struktur sosial dan institusi sosial. Lebih lanjut Durkheim menjelaskan, yang termasuk

struktur sosial misalnya sebuah kelompok birokrasi. Sedang yang termasuk institusi sosial adalah keluarga atau agama.<sup>13</sup>

Penggunaan teknik observasi terbatas dengan ciri partisipatif dalam penelitian ini memiliki kelebihan:

- a) adanya keterlibatan antara peneliti dengan sumber data namun hubungan yang terjadi tidak terlalu mendalam sehingga dapat dihindari nilai-nilai subjektivitas peneliti
- b) dapat mengembangkan teknik wawancara baik berstruktur maupun bebas
- c) peneliti memiliki kesempatan untuk mengembangkan raport yakni hubungan peneliti dengan nara sumber, sehingga akan memudahkan mendapatkan data-data.

#### d. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh di lapangan setelah melalui pemrosesan data, selanjutnya dianalisis guna menemukan jawaban-jawaban permasalahan penelitian.

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

- a) analisis kuantitatif, dilakukan dengan cara analisis tabel frekwensi yang dibantu dengan rumus prosentase:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

- b) analisis kualitatif, dilakukan dengan cara menjelaskan secara terinci hal-hal yang mendukung analisis kuantitatif dan menjelaskan gejala-gejala yang tidak dapat dijaring lewat kuesioner.

---

<sup>13</sup> Emile Durkheim, *"The Rules of Sociological Method"* dalam *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, ed. George Ritzer (Boston: Allyn and Bacon, 1980),

Dengan menggunakan analisis ganda ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dengan baik.

#### e. Langkah-langkah Penelitian

Untuk membangun alur pikiran yang logis dan sistematis dalam penelitian ini, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- a) *Heuristik*, yaitu usaha mencari dan mengumpulkan sumber-sumber.
- b) *Interpretasi*, yaitu menafsirkan keterangan dari berbagai sumber dan mensintesis hasil penafsiran itu dalam kerangka pemikiran yang logis dan sistematis.
- c) *Pelaporan*, penulisan laporan penelitian ini dibuat dengan merekonstruksi pemikiran berdasarkan fakta-fakta dan sumber data ke dalam bentuk tulisan yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sesuai dengan tujuannya, laporan penelitian ini disusun dalam format tesis.

### F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini tidak lebih karena peneliti ingin mengetahui partisipasi wanita muslim dalam kancah politik di era multipartai ini. Asumsi awal penulis, karena panggung politik selama ini adalah dunia yang tabu bagi wanita khususnya wanita muslim, yang lebih kongkrit kasusnya adalah terjadinya diskriminasi posisi organisasi bagi wanita. Dalam sebuah institusi organisasi baik itu organisasi politik atau sosial kemasyarakatan, seolah-olah ada peran spesial bagi wanita yang sangat mencolok perbedaannya dengan peran laki-laki. Wanita cukup sebagai pelengkap yang tidak dapat menyentuh peran primer laki.

dan sebagai pemegang kendali organisasi. Istilah 'haram' bagi wanita untuk menduduki jabatan penting dalam organisasi masih dipegang teguh oleh sebagian besar komunitas masyarakat Indonesia. Namun era reformasi ini agaknya merubah segala tatanan yang ada, termasuk peluang bagi wanita untuk berkarir di dunia politik. Lahirnya multipartai secara otomatis telah membuka tirani bagi wanita untuk dapat mengekspresikan diri lewat jalur politik. Kalau selama ini aspirasi wanita cukup disalurkan lewat tiga organisasi sosial politik, tapi pada saat ini mereka berlomba untuk memperjuangkan sesamanya lewat beberapa partai yang ada, dengan turut berkiprah aktif di dalamnya.

Selanjutnya, penefiti ingin mengkaji lebih jauh bentuk-bentuk partisipasi politik wanita muslim serta faktor-faktor yang melatarbelakangi partisipasi wanita muslim dalam dunia politik tersebut

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan laporan penelitian ini menggunakan sistem bab demi bab dan masing-masing bab dijadikan sub bab sesuai dengan kebutuhan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menggambarkan maksud dan arah penelitian. Di dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang kajian teoritis sebagai pendukung data lapangan. Di dalam bab ini disajikan tentang wanita muslim dan politik dengan sub bahasan pengertian wanita muslim dan beberapa hak atasnya. Kajian khusus politik juga



tersaji pada bab ini dengan rangkaian pembahasan tentang pengertian partisipasi politik dan ragam partisipasi politik. Selanjutnya sub bab terakhir dalam bab ini menjelaskan pengertian wanita muslim dan hak politik wanita muslim.

Bab tiga merupakan penyajian data empirik yang berisi tentang partisipasi politik wanita muslim di Surabaya. Dengan sub bahasan gambaran umum partai politik sebagai wadah politik wanita muslim Surabaya. Partisipasi politik wanita muslim Surabaya juga terangkum dalam bab ini.

Bab empat merupakan analisis data tentang partisipasi politik wanita muslim di Surabaya. Terakhir, bab lima, berisi kesimpulan. Laporan ini diakhiri dengan penutup dan lampiran-lampiran seperlunya.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS TENTANG PARTISIPASI POLITIK WANITA MUSLIM**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah tentang partisipasi politik dan ragamnya serta landasan-landasan yang ideal tentang wanita muslim dan hak politiknya, dalam bab ini penulis jelaskan bahasan hal tersebut.

#### **A. Partisipasi Politik dan Ragamnya**

Istilah partisipasi politik mengandung arti suatu perilaku yang berkenaan dengan politik. Sedangkan politik sendiri, adalah suatu interaksi antar individu atau kelompok dalam hubungannya dengan proses pengambilan keputusan. Hal ini lebih ditegaskan oleh Huntington<sup>14</sup> bahwa partisipasi politik adalah aktivitas yang kongkrit dan dapat diamati secara langsung. Dengan demikian aktivitas yang secara implisit belum dilakukan bukan merupakan partisipasi politik. Seperti halnya sikap-sikap yang masih dalam angan, dan pengetahuan politik yang tidak direalisasikan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa aktivitas kongkrit yang berhubungan dengan proses politik saja yang dapat dikatakan bentuk partisipasi politik. Proses politik itu sendiri sebagaimana disebutkan oleh David Easton, merupakan interaksi di antara lembaga-lembaga pemerintahan dan kelompok-kelompok sosial. Hal ini

---

<sup>14</sup> Huntington, *No Easy Choice: Political Participation*, 6

menunjukkan tidak hanya aktivitas yang ada pada tingkat elit tetapi melihat sudut pandang yang lebih pluralistik yang menyertakan analisis pada aktivitas-aktivitas berbagai kelompok yang terorganisir di luar pemerintahan, dengan memberikan penekanan pada individu-individu, kepentingan-kepentingan bersama dan nilai normatif.<sup>15</sup> Kepentingan-kepentingan bersama ini kemudian berkonotasi pada adanya satu pembuatan keputusan untuk keperluan bersama.

Mengingat adanya keperluan dan kepentingan bersama yang hendak dicapai dalam proses politik, maka di dalam interaksi itu tidak akan lepas dari adanya usaha-usaha untuk saling mempertahankan kepentingan masing-masing. Individu atau kelompok akan saling mempertahankan apa saja yang akan didapatkan dalam berhubungan dengan keputusan yang akan ditentukan. Masing-masing akan menggunakan segala kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan yang akan ditetapkan sesuai dengan kepentingan yang dibawanya. Maka akan terjadi saling tawar-menawar atau saling konflik dengan menggunakan kekuatan politik masing-masing. Kegiatan ini dapat berupa saling memberikan tuntutan atau saling memberikan dukungan kepada isu-isu politik yang sedang beredar. Arah partisipasi politik ini dapat dikatakan sebagai orientasi kepada input proses politik. Namun untuk lebih jelas Lester Milbrath menjelaskan tentang hal ini.

Partisipasi politik dipandang memiliki beberapa pola orientasi sehubungan dengan proses politik. Sekurangnya ada dua bentuk yang sangat kontras.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> David Easton, *Proses Politik*, ter. Priatmoko, (Surabaya: FISIP UNAER, tt.), 4

<sup>16</sup> Lester W. Milbrath, *Political Participation*, dalam *Power, Participation, and Ideology*, ed. Calvin J. Larson dan Philo C. Wasburn, (New York: DavidMc Kay Company Inc, 1969), 165.

Partisipasi politik berorientasi pada output proses politik dan pada input proses politik. Partisipasi politik dengan orientasi pada input proses politik adalah aktivitas individu atau kelompok yang berkenaan dengan masukan-masukan proses pembuatan kebijakan. Lebih kongkritnya diwujudkan dalam bentuk memberikan tuntutan atau dukungan atau ulasan analisa terhadap bagaimana sebaiknya suatu rancangan keputusan yang akan mengikat setiap kelompok dalam satu sistem politik, ditetapkan. Maka dari keadaan ini individu atau kelompok amat aktif. Mereka banyak memiliki informasi dan memiliki tingkat kedekatan dengan pihak elit sangat baik. Mereka dapat saling komunikasi dengan kelompok kekuatan politik lain untuk saling menguatkan atau melakukan konfrontasi dan konflik. Umumnya hal ini didasarkan pada kepentingan masing-masing Partisipasi ini disebut dengan partisipasi yang aktif.

Pola partisipasi politik yang lain adalah pola partisipasi pasif, yang berorientasi pada output proses politik. Output ini tidak lain menyangkut adanya hasil proses politik yaitu kebijakan yang telah disahkan untuk (idealnya) dipatuhi setiap individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Manifestasi hal ini dapat berupa tindakan-tindakan yang berusaha menjalankan kebijakan tersebut dan melestarikannya, atau bahkan tindakan antagonis yakni mengadakan perlawanan terhadap ketentuan kebijakan tersebut. Semua aktivitas itu memiliki tujuan-tujuan tertentu terhadap kebijakan.

Selanjutnya Milbrath juga memberikan keterangan tentang pola partisipasi politik tak aktif. Pola partisipasi ini lebih melihat pada aktivitas individu yang tidak melakukan suatu kegiatan politik yang berkenaan dengan kebijakan politik. Aktivitas

ini merupakan sikap dan perilaku politik yang memiliki kesengajaan. Maka aktivitas ini dibedakan dengan aktivitas yang tidak dilakukan sebab ketidakmampuan.

Alasan-alasan keterlibatan wanita muslim dalam berpartisipasi politik, menurut Milbrath dimungkinkan karena:

1. Mencari kekuasaan untuk mengesahkan kebaikan bersama, atau kepentingan kolektif.
2. Ekspresi kepentingan diri sendiri atau kelompok untuk memperoleh realisasi kepentingan pribadi
3. Motif deprivasi psikologi. Dasar didikan/sosialisasi akan mempengaruhi perkembangan perilaku politik seseorang

Di samping itu, Milbrath juga mengatakan bahwa partisipasi politik bervariasi berkaitan dengan 4 faktor utama yaitu:<sup>17</sup>

1. Sejauh mana seseorang menerima perangsang-perangsang politik.

Semakin peka atau terbuka seseorang terhadap perangsang politik lewat kontak pribadi, organisatoris dan media massa, makin besar kemungkinan dia turut serta dalam kegiatan politik.

2. Karakteristik pribadi seseorang

Pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap, pengalaman dan kepribadiannya, mempengaruhi tanggapan terhadap rangsangan, dengan demikian menunjukkan sejauh mana dia terlibat dalam kegiatan politik

3. Karakteristik sosial seseorang.

---

<sup>17</sup> Ibid.,214

Misalnya status sosio ekonomi, kelompok, ras atau etnik, usia, seks, dan agama.

Ini terjadi pada masyarakat baik yang hidup di kota atau di desa.

4. Keadaan politik atau lingkungan politik dimana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri.

Misalnya sifat dari sistem politik sistem partai, ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa khusus, seperti pemilu.

Untuk menganalisa/partisipasi dari segi tipe-tipe organisasi yang berlainan biasanya digunakan landasan bagi partisipasi tersebut. Di antara landasan-landasan yang lazim adalah:

1. Kelas, yaitu:

Perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan dan pekerjaan yang serupa

2. Kelompok/komunal, yaitu :

Perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa, atau etnisitas yang sama

3. Lingkungan/*neighbourhood*, yaitu:

Perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain

4. Partai, yaitu:

Perorangan-perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi foimal yang sama untuk berusaha meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan

5. Golongan/*faction*, yaitu:

Perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus atau intens satu dengan lainnya, dan salah satu manifestasinya adalah

pengelompokan patron klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik di antara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh tidak sederajat.<sup>18</sup>

Sedang bentuk-bentuk partisipasi politik, Huntington dan Neison menyebutkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemilihan yang mencakup anantara lain kegiatan memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. *Lobbying*, mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
3. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya dan eksplisit mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi/*contacting*, merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
5. Tindak kekerasan/*violence*, secara umum dibagi 3, yaitu:

---

<sup>18</sup> Huntington dan Helton, *No Easy Choice: Political Participation*, 18

- a. kegiatan politik yang bertujuan merubah atau mengganti kepemimpinan politik.

misalnya: kudeta

- b. kegiatan politik yang bertujuan merubah kebijaksanaan umum yang ada.

misalnya: protes, huru-hara

- c. kegiatan yang bertujuan mengganti seluruh sistem politik yang ada.

misalnya: revolusi

Dimensi-dimensi partisipasi politik juga diperlukan untuk melihat sering tidaknya seseorang dalam berpartisipasi politik, antara lain:

- a. Terbuka/*overt* dan tertutup/*covert*.

Partisipasi politik terbuka adalah tindakan politik warga biasa yang diketahui oleh publik sehingga ada kemungkinan tindakan itu akan dikritik atau didukung oleh orang lain. Misalnya menulis surat pembaca di surat kabar. Partisipasi tertutup adalah tindakan politik warga biasa yang tidak diketahui publik sehingga kemungkinan kecil dibahas oleh publik. Misalnya, mengirim surat tentang kebijakan-kebijakan kepada menteri/presiden.

- b. Otonom dan penataan/*compliant*.

Partisipasi politik otonom adalah kegiatan warga biasa yang muncul atas prakarsa'sendiri. Partisipasi penataan adalah tindakan politik yang timbul karena adanya perintah atau desakan dari pihak lain.

- c. Kadangkala/*intermitten* dan berkesinambungan/*continous*.

Partisipasi kadangkala adalah tindakan politik yang dilakukan secara sekali-sekali atau pada waktu tertentu saja, misalnya: pemilu. Partisipasi politik



berkesinambungan adalah tindakan politik yang dilakukan secara terus menerus, misal, sebagai politisi.

d. *Input dan output*

Partisipasi politik input yaitu tindakan politik yang berorientasi pada input atau masukan, misalnya memilih dalam pemilu. Partisipasi politik output yaitu tindakan politik yang berorientasi pada output, misalnya mendapat pelayanan, ketertiban umum.

e. Ekspresi dan instrumental.

Perbedaan keduanya terletak pada motivasi aktor yang melakukan kegiatan politik. Partisipasi ekspresif yaitu kegiatan yang berfokus pada manipulasi simbol, melakukan kegiatan itu sendiri sudah merupakan kepuasan tersendiri atau telah mengurangi dorongan-dorongan tersendiri. Partisipasi politik instrumental yaitu partisipasi politik yang diarahkan pada manipulasi atau merubah sesuatu.

f. Verbal dan tak verbal.

Partisipasi politik verbal adalah kegiatan yang memerlukan dan melibatkan pembicara, tulisan pidato politik, misal, debat, kampanye. Partisipasi politik tak verbal adalah kegiatan politik berupa tindakan dan gerakan tanpa menggunakan bahasa lisan dan tertulis, misal, parade politik dan mogok makan,

g. Sosial dan non sosial

Partisipasi politik sosial adalah partisipasi politik yang memerlukan interaksi sosial yang intensif, misal, mencari sumbangan untuk dana kampanye dari rumah ke rumah.<sup>19</sup>

## **B. Wanita Muslim**

### **1. Pengertian Wanita Muslim**

Sebagaimana telah penulis paparkan pada bab I tepatnya pada sub bab penegasan judul bahwa yang dimaksud dengan wanita muslim adalah sebutan bagi wanita yang beragama Islam, yang menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada ajaran agama Islam.

Inti ajaran Islam tersebut terangkum dalam rukun iman yang terdiri dari enam ajaran, dan rukun Islam yang memuat lima kewajiban pokok umat Islam. Selain itu Islam dikenal sebagai agama yang berjuang menegakkan keadilan, persaudaraan, dan persamaan derajat manusia. Tidak ada perbedaan antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam. Demikian juga pembebanan kewajiban tanggung jawab antara laki-laki dan wanita adalah sama. Bagi Islam, manusia yang baik derajatnya adalah manusia yang paling banyak berbuat yang bermanfaat bagi kemanusiaan, dan yang paling bertakwa kepada Allah Swt.<sup>20</sup>

Beberapa komponen di atas dapat dikelompokkan dalam beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh wanita muslim sejati agar senantiasa berada dalam kelompok wanita muslim. Sekurang-kurangnya ada lima kewajiban yang harus dilaksanakan,

---

<sup>19</sup> A. Ramlan Surbakti, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Surabaya: Airlangga University Press, 1984), 9

<sup>20</sup> Depag, *Ensiklopedi Islam*, 44 5.

yaitu kewajiban terhadap dien-nya, kewajiban terhadap pribadinya (*wajibat al-shahsiyah*), kewajiban terhadap rumah tangganya (*wajibat al-baitiyah*), kewajiban terhadap masyarakatnya (*wajibat al-ijtima'iyah*), dan kewajiban terhadap negaranya (*wajibat al-wataniyyah*).<sup>21</sup> Berikut ini penulis uraikan lima kewajiban tersebut.

a. Kewajiban terhadap Din-nya (*wajibat al-diniyah*)

Yang dimaksud wajibat diniyyah yaitu kewajiban yang membuktikan ketinggian Islam di atas nilai, ideologi, dan tatanan hidup lainnya. Untuk membuktikan ketinggian Islam, sekurang-kurangnya ada tiga langkah yang harus ditempuh wanita muslim.

Pertama, memiliki akhlak karimah, bukan hanya dengan keindahan pakaian, kecukupan perhiasan dan hal-hal yang bersifat materi lainnya. Ketinggian suatu bangsa, kemuliaan suatu golongan dapat diukur dari akhlak yang dimiliki manusianya. Karena itu akhlak dapat dijadikan parameter keberhasilan bangsa. Ekses yang ditimbulkan akhlak memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kedua, meningkatkan ilmu dan kecerdasan, bukan dengan kepandaian memoles wajah dengan berbagai alat kosmetika yang makin beragam. Sebab dengan ilmu dan kecerdasan yang tinggi, wanita muslim akan terangkat derajatnya. Bila derajat wanita muslim tinggi, maka ia akan mampu meninggikan Islam<sup>22</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat al -Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

---

<sup>21</sup> N.M Shaikh, *Wowen in Muslim Sociely* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1991), 19

<sup>22</sup> Ibid.,33

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman diantara kamu dan orang yang berilmu<sup>23</sup>

Begitu juga dalam surat al-Zumar ayat 9, Allah kembali menegaskan: 1 jJl

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?, sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran<sup>24</sup>

Ayat-ayat di atas nampak jelas, betapa Allah tidak membedakan hamba-Nya antara wanita dan laki-laki. Yang membedakan mereka hanyalah kualitas keilmuan mereka. Ayat-ayat tersebut juga mempertegas bahwa peringkat kualitas diri menjadi hak siapa saja.

Fatima Mernissi dalam bukunya "*Women's Rebellion and Islamic Memory*" juga mengemukakan wanita yang sibuk melakukan operasi pengencangan wajah. Karena upaya untuk membuat awet muda dapat dilakukan dengan melakukan hal yang lebih positif, yaitu membiasakan menulis setiap hari. Menulis, di samping dapat meningkatkan wacana dan keilmuan, ternyata menurut Fatima, menulis dapat membuat kulit menjadi segar dan dapat meningkatkan aktivitas sel tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli krim pelembab yang harganya relatif mahal.

---

<sup>23</sup> al-Qur'an, 58:11.

<sup>24</sup> Ibid.,39: 9

Pernyataan Fatima ini didukung dengan penglihatan empiriknya terhadap sejumlah wanita-wanita produktif yang aktif menulis. Di antaranya, Nawal el Sadawi, Assia Djebbar, Hannaan al Shaikh, Liana Badr, Fatima sendiri, serta yang lain-lain.<sup>25</sup>

Ketiga, memperbanyak amal, gerak, dan perjuangan yang baik. Sebab dengan amal saleh itu seseorang dihormati. Sejarah telah membuktikan betapa banyak perempuan menjadi terkenal dan dihormati karena amalnya banyak. Misal, Siti Khadjah. Siti Fatimah, dan lain-lain.

b. Kewajiban terhadap Pribadinya (*wajibat al-shahsiyah*)

Wajibat shahsiyah yaitu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap dirinya sendiri agar kualitas pribadi wanita muslim semakin baik. Hal ini menyangkut persoalan jasmani maupun rohani. Adapun kewajiban terhadap jasmani antara lain: Pertama, menjaga kebersihan diri, baik kebersihan badan, pakaian, maupun lingkungan rumah.

Kedua, menjaga kesehatan, sebab tugas wanita muslim sangat banyak, akan sulit dilaksanakan dengan baik kalau dia sakit-sakitan. Karena itu, nilai kesehatan amat penting, lebih-lebih bagi seorang wanita yang mempunyai tugas sebagai seorang ibu untuk mengasuh anak-anaknya. Sedangkan kewajiban terhadap rohani antara lain:

Pertama, memiliki akidah yang salimah dengan membuang jauh segala keyakinan dan kepercayaan yang tidak benar.

---

<sup>25</sup> Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita*, ter. Rahmani Astuti (Bendung; Mizan, 1999), 30.

Kedua, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, seperti: riya', 'ujub, takabbur, ghibah dan lainnya. Sifat-sifat tercela tersebut lalu diisi dengan sifat-sifat terpuji. Untuk memantapkan ruhani, wanita muslim harus melaksanakan hal-hal yang dapat memperkokoh imannya dalam bentuk amal saleh, seperti memahami ajaran Islam dengan benar, dan siap menghadapi tantangan hidup dengan memiliki sifat istiqomah.<sup>26</sup>

c. Kewajiban terhadap Rumah Tangganya (*wajibat al-baitiyah*)

Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh wanita muslim dalam kehidupan rumah tangga. Seorang wanita dalam kaitannya dengan keluarga memiliki peran yang sangat utama. Wanita harus pandai mengatur suasana rumah yang baik, nyaman, dan tentram. Wanita muslim juga harus pandai menjadi pendamping suami yang baik dalam setiap usaha serta memberikan masukan kepada suami tentang hal-hal yang berguna. Intinya, wanita muslim sebagai istri dalam rumah tangga memiliki sikap saling pengertian terhadap suami dengan saling melengkapi di antara keduanya akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing pihak.

Agar dapat melaksanakan kewajiban terhadap rumah tangganya, tentu saja wanita harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan hal itu. Oleh sebab itu wanita muslim seharusnya mampu mengembangkan diri dan mampu memahami hakikat peranannya dalam kehidupan keluarga.

---

<sup>26</sup> Shaikh, Women, 35.

Dengan demikian, kemuliaan dan kehormatan rumah tangga salah satu kuncinya terletak pada wanita, baik peranan dia sebagai istri maupun sebagai ibu. Bila wanita muslim dapat berperan dengan baik, maka kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan tentram dan damai. Perlu dipahami bahwa bukan berarti kedamaian dan ketentraman rumah menjadi kewajiban mutlak yang didominasi oleh wanita, namun wanita dalam rumah tangga punya kewajiban untuk menciptakan ketentraman bersama dengan laki-laki (suami). Sebaliknya. Bila wanita muslim tidak mampu memerankan perannya dalam kehidupan rumah tangga secara baik, kemungkinan besar kehidupan rumah tangga akan berantakan.<sup>27</sup>

d. Kewajiban terhadap Masyarakatnya (*wajibat al-ijtima'iyah*)

Sebagai makhluk sosial wanita tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Kehadiran wanita muslim di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan. Wanita-wanita yang dibutuhkan ini adalah wanita-wanita yang memiliki keahlian dan ketrampilan. Sehingga dengan paduan kemusliman dan kemampuan tersebut, dia dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat kepada yang baik.

Tegasnya, banyak peran positif yang dapat dimainkan oleh setiap wanita muslim. Tentu saja dalam hal ini wanita muslim harus pandai mengatur waktu sehingga peranannya di masyarakat tidak mengganggu, apalagi mengabaikan

---

<sup>27</sup> Ibid 43

tanggungjawabnya dalam urusan keluarga. Dalam kaitan ini Allah berfirman dalam surat al-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ  
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>28</sup>

Implikasi dari ayat di atas jelas, bahwa wanita punya andil besar dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas dalam masyarakat. Karena Allah telah memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk melakukan satu sikap amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan bermasyarakat. Perlu ditegaskan di sini, sikap amar ma'ruf nahi mungkar memiliki ekses yang sangat luas. Tidak terbatas pada pemahaman perintah-perintah ritual saja, tetapi amar ma'ruf nahi mungkar di sini dapat dipahami sebagai satu sikap untuk melakukan pemampuan terhadap komunitas atau sebagai langkah peningkatan kualitas sumber daya yang sesuai dengan standar kebutuhan dan tidak menyalahi aturan-aturan yang telah digariskan oleh Islam.<sup>29</sup>

e. Kewajiban terhadap Negara (*wajibat al-wataniyah*)

---

<sup>28</sup> al-Qur'an, 9 : 71

<sup>29</sup> Shaikh, Womn,6



Wanita muslim sebagai bagian dari negara wajar bagi mereka memiliki cita-cita dan berusaha mencapai cita-cita terwujudnya negara dan bangsa yang adil dan makmur. Sejak masa Nabi Muhammad sampai pada sahabat dan sesudahnya, wanita banyak berperan dalam perjuangan membela negara.

Di masa Nabi Muhammad Saw. tersebutlah Asma' binti Abu Bakr yang perjuangan dan keberaniannya amat menakjubkan dan membantu Nabi saat hijrah ke Madinah. Perjuangan yang dilakukan Asma' ini tidak lain kecuali untuk mewujudkan negeri Islam.

Dengan demikian wanita muslim memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam pembelaan negara. Ungkapan penting yang sejalan dengan peran wanita terhadap negaranya:

الْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتِ الْبِلَادُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْبِلَادُ

Artinya: *Wanita itu tiang negara, bila wanitanya baik, baiklah negara itu, dan apabila wanita-wanitanya buruk, buruklah negara itu.*<sup>30</sup>

## 2. Hak Politik Wanita Muslim

Setiap makhluk hidup mendapatkan hak akan kehormatan dan individualitas yang hakiki. Dalam konteks penciptaan dan pembentukannya, serantian hak dan kebebasan telah diberikan kepadanya yang sama sekali tidak boleh disangkal atau direbut darinya.

Satu-satunya bukti yang dapat diandalkan dan dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui hak-hak manusia yang sebenarnya adalah kitab suci yang tidak ternilai

---

<sup>30</sup> Ibid.75

harganya. Dengan menunjuk kepada halaman-halaman dan basis-basis kitab agung ini, hak-hak sesungguhnya yang dimiliki bersama oleh seluruh umat manusia baik itu wanita maupun pria dapatlah diketahui.

Kandungan-kandungan dalam al-Qur'an banyak memberikan pandangan optimistis terhadap kedudukan dan keberadaan wanita. Ayat-ayat yang membicarakan tentang Adam dan Hawa, sampai keluar ke bumi selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*damir Muthanna*), seperti kata *huma*, misalnya keduanya memanfaatkan fasilitas surga (Qs. Al-Baqarah ; 35), mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (Q.S. al-A'raf; 20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbuang ke bumi ( Q.S. al-A'raf; 22), sama- sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S. al-A'raf ; 23). Setelah di bumi, antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka (Q.S. al-Baqarah; 187).

Al-Qur'an tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic*, yang mengistimewakan suku tertentu. Pria dan wanita dari suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi abid dan khalifah. Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnis dan jenis kelamin. Pernyataan ini dijustifikasi dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"Hai manusia! sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang pria dan seorang wanita. Dan Kami jadikan kamu beibangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal (rukun dan damai). Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*<sup>31</sup>

Ayat ini memberikan dasar yang kokoh bagi terciptanya perdamaian dunia serta memberikan *impulse* bagi semua insan untuk berkompetisi dalam kebaikan, dengan kompensasi janji Tuhan bahwa mereka yang paling bertakwa akan mendapat kemuliaan di sisi Tuhan bukan faktor gender atau kesukuan.

Sosok ideal wanita muslim digambarkan sebagai wanita yang memiliki hak-hak kemerdekaan dan kemandirian di berbagai bidang termasuk bidang politik.

Islam sebagai agama yang melindungi hak-hak wanita telah memberikan hak politik bagi wanita. Wanita berhak dipilih dan memilih untuk berperan serta dalam masalah-masalah umum kemasyarakatan. Dalam al-Qur'an digambarkan satu sosok ratu Bulqis yang mempunyai kerajaan "*super power*" (*arsun azim*).<sup>32</sup> Ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Naml ayat 23 yang berbunyi:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya aku menemui seorang wanita yang memerintah mereka. Dia diberi segala sesuatu dan mempunyai singgasana besar. (Wanita itu ialah ratu Bulqis, kerajaannya Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman)."*<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> al-Qur'an, 49: 13

<sup>32</sup> Hadiyah Salim, *Wanita Islam, Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 53.

<sup>33</sup> al-Qur'an, 27: 23

Dalam beberapa riwayat juga disebutkan betapa kaum wanita dipermulaan Islam memegang peranan penting dalam kegiatan politik. Istri-istri Nabi terutama A'isyah telah menjalankan peran politik penting. Ini terjadi pada saat A'isyah berusia 42 tahun. Ia terjun ke kancah pertempuran sebagai pimpinan sebuah pasukan yang menentang keabsahan khalifah keempat, Ali bin Abi Talib. Peperangan ini terjadi di Basrali pada 4 Desember 656 M. Peranan A'isyah di sini merupakan keterlibatan 'paling nyata' dalam kehidupan politik.<sup>34</sup>

A'isyah telah memainkan peranan kunci dalam kehidupan dua khalifah yang pertama, dan dia memberikan andil dalam mengguncang khalifah ketiga, Uthman, dengan menolak membantunya ketika ia dikepung oleh para pemberontak di rumahnya sendiri.

A'isyah meninggalkan Madinah ketika kota itu berada di ujung tanduk perang saudara, untuk melakukan ibadah haji ke Makkah, sekalipun banyak protes dari para pemuka keluarga atau kelompoknya. Demikian juga terhadap Ali, khalifah keempat, A'isyah memberikan andil yang cukup besar bagi kejatuhan Alf dengan memimpin pasukan pemberontak yang menentang keabsahannya. Para sejarawan menyebut pertempuran ini dengan "*Perang Unta*" merujuk kepada unta yang dikendarai oleh A'isyah.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> D. A. Spellberg, *Politics, Gender, and The Islamic Past, The Legacy of A'isha bint Abi Bakr* (New York: Columbia University Press, 1994), 151

<sup>35</sup> Ibid., 154.

Meskipun fakta sejarah keterlibatan A'isyah di kancah politik benar-benar terjadi, tidak sedikit tokoh muslim yang menolak bahkan menegaskan bahwa wanita tidak pernah ada dalam sejarah politik Islam.

Sebuah buku tulisan Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman 'Arafa yang berjudul "*Huquq al Mar'ah fi al Islam*", mempertahankan bahwa wanita tidak memiliki hak-hak politis. Lebih lanjut ia menulis:

"Sejak permulaan Islam, kaum wanita tidak memainkan peranan dalam masalah-masalah umum di samping semua hak-hak yang telah diberikan Islam kepada mereka, yang seringkali sama dengan hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki.

Ketika para sahabat Rasulullah Saw. bermusyawarah di antara sahabat sendiri setelah kematian Rasulullah untuk memilih pengganti (khalifah) pada pertemuan yang dikenal dengan "*Pertemuan Rumah Bani Sa'idah*", tidak satupun wanita yang disebutkan ikut ambil bagian dalam pertemuan tersebut. Kita tidak memiliki bukti keterlibatan mereka dalam pemilihan tiga khalafa'al rashidin. Di seluruh sejarah Islam tidak disebutkan adanya peran serta kaum wanita sejajar dengan kaum laki-laki dalam mengatur urusan negara, baik dalam pembuatan keputusan politis maupun dalam perencanaan strategis.<sup>36</sup>

Menghadapi kasus A'isyah yang memimpin perang unta, 'Arafa cenderung menganggap bahwa itu merupakan tindakan A'isyah pribadi yang tidak dapat

---

<sup>36</sup> Muhammad bin Abdullah bin Sulayman 'Arafa, *Huquq al Mar'ah fi al Islam*, ed. m (Kairo: Al Maktab al Islami, 1980), 149.

dijadikan legitimasi untuk membenarkan peranan kaum wanita dalam urusan politik. Bahkan tindakan A'isyah ini dianggap sebagai bid'ah.<sup>37</sup>

Kritik tajam dilontarkan juga oleh Said al Afghani, menurutnya, gara-gara A'isyah campur tangan dalam urusan politik, ribuan darah kaum muslim telah tumpah, ribuan sahabat Rasulullah telah terbunuh, para pemimpin terkemuka kehilangan nyawanya.<sup>38</sup> A'isyah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pertumpahan darah pada Perang Unta, yang menyebabkan terpecahnya dunia muslim ke dalam dua friksi yaitu Sunni dan Shi'i. Dia juga bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang diderita pengikutnya. Al-Afghani yakin seandainya A'isyah tidak turut campur dalam urusan-urusan umum negara Islam, sejarah muslim pastilah akan melalui jalan damai, kemajuan dan kemakmuran.<sup>39</sup>

Demikian gencarnya sikap apriori tokoh-tokoh muslim terhadap keterlibatan wanita dalam politik, memunculkan keheranan darimana sumber-sumber sejarah yang mereka ambil sehingga bisa menyimpulkan bahwa A'isyah telah bersalah dengan menimbulkan pertumpahan darah. Padahal menurut kesaksian orang-orang sejamannya, A'isyah merupakan sosok wanita yang tidak memiliki tandingan dikalangan kaum wanita dan laki-laki pada masanya. Kasus yang dialami A'isyah juga digeneralisasikan oleh tokoh-tokoh muslim bahwa kasus A'isyah adalah kasus semua wanita, dengan demikian menghapus jutaan warga negara wanita dengan hak-hak politiknya.

---

<sup>37</sup> Ibid., 150.

<sup>38</sup> Sa'id Al Afghani., *A'ishah Wa al Siyash* (Beirut: Dar al -Fikr, 1971),42

<sup>39</sup> Ibid.,46.

Sebenarnya A'isyah hanyalah satu di antara sejumlah wanita di jaman Rasulullah yang terlibat dalam politik. Ada beberapa deret nama wanita-wanita yang terlibat, misalnya, Ummu Salamah (istri Nabi), Safiyah, Laiyla al Ghaffariyah, Unimu Sinam al Aslamiyah, Atika binti Yazid ibn Mu'awiyah, Ummu Salamah binti Ya'kub, Al-Khayzaran binti Atak, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Pada generasi selanjutnya juga bermunculan ratu-ratu Islam yang sukses mengendalikan pemerintahan dan hampir terlupakan, diantaranya, Sultanah Radiyah bint Shams al-Din Itunisy tokoh wanita muslim dari Turki, Turkan Khatun dari Saljuk, Shajarat al-Dur tokoh wanita Mesir, Sultanah Khadijah dari kepulauan Hindia, Asma' binti Shihab al-Sulayhiyyah dari dinasti Shi'ah Yaman.<sup>41</sup>

Dengan demikian tidaklah benar jika ada anggapan bahwa wanita dan politik, dua hal yang berlawanan. Karena firman-firman Allah sendiri telah banyak menjelaskan hak-hak wanita dalam politik sebagaimana ayat-ayat di atas.

---

<sup>40</sup> Ibrahim Daquqi, *Al-Nisa'al-Hakimah fi al-tarih* (Bagdad: Matba'di al-Sa'dun, 197

<sup>41</sup> Fatima Memisi, *The Forgotten Queens of Islam* (tt.: PolityPres«, 1993), 52-76.





### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA**

Sebelum sampai tahap analisis data, pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian di lapangan. Data-data yang peneliti peroleh berupa data kuantitatif yang akan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Sedangkan data kualitatif disajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang relevan untuk melengkapi temuan data kuantitatif.

Data-data yang berupa tabel frekuensi disajikan terpisah menurut objek penelitian. Ini dimaksudkan agar karakteristik awal antara responden di dalam objek penelitian yang satu dengan yang lainnya bisa dibedakan untuk bahan analisis komparasi. Sedangkan penyajian gabungan secara keseluruhan berguna sebagai bahan analisis keseluruhan "Partisipasi Politik Wanita Muslim di Surabaya".

#### **A. Partisipasi Politik Wanita Muslim di Partai Kebangkitan Bangsa**

##### **1. Gambaran Umum Wanita Muslim di Partai Kebangkitan Bangsa**

Wanita yang bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa sebagian besar berlatar belakang dari organisasi kemasyarakatan *underbouw* Nahdlatul Ulama' seperti Muslimat, Fatayat, dan IPPNU.

Sebagian besar mereka aktif di biro (istilah untuk pembagian sub bidang garap partai) 'Pengembangan Sumber Daya Perempuan', bidang khusus yang menangani masalah-masalah wanita. Ada sebagian kecil yang terlibat di biro-biro lain, seperti biro advokasi ada satu nama wanita yang tertera di bidang tersebut di

biro da'wah juga satu orang, biro pemenangan pemilu satu orang, biro pemuda tiga orang, biro organisasi dua orang, biro ekonomi dan satu orang, dan biro media massa dua orang.

Masih ada beberapa biro lagi dalam struktur PKB, antara lain : biro penelitian dan pengembangan, biro pendidikan dan latihan, biro mahasiswa, biro satuan tugas, dan biro pembinaan tenaga kerja. Akan tetapi pada biro-biro yang disebut terakhir ini tidak ada nama-nama wanita yang terdaftar sebagai pengurus.

Koordinator masing-masing biro juga tidak ada yang dipegang wanita, kecuali biro pengembangan sumber daya perempuan dan staf wakil ketua (pengurus harian) yang membawahi bidang pengembangan sumber daya perempuan.

Meskipun ada beberapa wanita yang terlibat di biro selain biro pemberdayaan perempuan, namun mereka lebih banyak disibukkan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh biro pengembangan sumber daya perempuan. Perlu diketahui bahwa, biro Pengembangan Sumber Daya Perempuan ini memiliki wadah (*ex officio* PSDP) yang bernama Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa, suatu wadah pemberdayaan yang diperuntukkan bagi wanita yang aktif di PKB.

Baru-baru ini tepatnya tanggal 10-11 Juni 2000, FPKB mengadakan Semiloka dan Musker di Hotel Utami. Peneliti melihat bahwa wanita-wanita yang terlibat di acara tersebut tidak hanya mereka yang tergabung dalam pengurus PSDP, tetapi mereka yang menjadi pengurus biro lain juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Begitu juga pada beberapa kali rapat yang diselenggarakan oleh biro PSDP yang sempat peneliti lihat juga demikian. Ini berlangsung karena wanita-wanita yang terlibat di biro PSDP belum sepenuhnya optimal untuk menjalankan tugas

kepengurusannya di PKB khususnya di biro PSDP, mengingat pengutus wilayah PKB tidak semuanya berdomisili di Surabaya. Demi kesuksesan beberapa program yang direncanakan biro PSDP maka operasionalisasi kegiatan-kegiatan untuk sementara juga melibatkan wanita-wanita di luar biro PSDP.

Cukup membahagiakan bagi warga PKB, karena dengan kemenangan PKB di Jawa Timur pada pesta demokrasi 1999 kemarin, mampu mengantarkan empat wakil wanita untuk duduk di kursi legislatif. Seorang di komisi A, seorang lagi di komisi D, dan dua orang lainnya di komisi E.

## 2. Usia Wanita Mudim d Partai Kebangkitan Bangsa

Faktor usia sangat mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam politik. Asumsi awal penulis, karena yang menjadi objek penelitian adalah Dewan Pimpinan Wilayah, maka mayoritas wanita-wanita yang teribat di sini adalah mereka yang sudah dewasa paling tidak di atas usia 35 tahun. Namun berdasarkan hasil angket penulis memperoleh gambaran sebagai berikut:

TABEL I  
Umur Responden

No	Jenis Pertanyaan	Umur Responden				Jumlah N% F      %			
		25-35	36-45	46-55	56-65				
		F %	F %	F %	F %				
1	Berapakah umur responden	3	37,5	4	50	1	12,5	8	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa usia wanita yang aktif di PKB adalah 30% bemsia 25-30 tahun, 50% berusia 36-45 tahun, dan 10% berusia 46-55 tahun. Sedang wanita yang berusia 56-65 tahun tidak ada yang terlibat di PKB. Kondisi

ini terjadi karena tidak ada aturan standar minimal atau standar maksimal usia untuk aktif di partai politik. Faktor penentu untuk terlibat di partai politik adalah kemauan, kesempatan, dan kemampuan dalam politik.

### 3. Status Perkawinan Responden

Untuk mengetahui bagaimana status perkawinan wanita muslim yang menjadi pengurus di PKB, berikut ini tabel menunjukkan keadaan tersebut, dengan memberikan opsi jawaban kawin, janda, dan tidak (belum) kawin.

TABEL II  
Status Perkawinan Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kawin    Janda    Tidak Kawin			Jumlah N% F       %	
		F %	F %	F %		
2	Status perkawinan responden	4	50	1    12,5	3    37,5	8    100

Jumlah wanita aktif di PKB Wilayah Jawa Timur yang sudah menikah sebanyak 50%, janda hanya 12,5%, dan yang belum menikah sebanyak 37,5%. Jumlah wanita yang belum menikah lebih lumayan besar karena usia mereka memang masih muda. Meskipun dalam usia yang cukup muda mereka tetap memutuskan untuk bergabung di parpol, karena memang tidak ada undang-undang yang mengharuskan wanita harus menikah untuk aktif di parpol. Demikian juga bagi yang sudah menikah, aktif di partai politik bukan kendala bagi yang berkeluarga, meskipun kegiatan rumah tangga sangat membutuhkan perhatian ekstra.

#### 4. Tingkat Pendidikan Wanita Muslim di PKB

Menurut Seymour Martin Lipset, bahwa terdapat hubungan antara pendidikan, dengan partisipasi politik. Maka untuk mengetahui latar belakang pendidikan wanita-wanita muslim yang tergabung di PKB, peneliti memperoleh data sebagai berikut

TABEL III  
Tingkat Pendidikan Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kategori A B C D						Jumlah N% F %	
		F %		F %		F %			
3	Apakah pendidikan formal teraklir responden	2	25	4	50	2	25	8	100

Keterangan : A = SLTP  
B = SLTA  
C = Perguruan Tinggi  
D = Lain-lain

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan wanita di PKB cukup baik. Ini terlihat dari jumlah lulusan Perguruan Tinggi mendominasi data angket di atas. Dengan perincian 50% lulus dari Perguruan Tinggi, 25% lulusan SLTA, dan 25% menjawab lain-lain. Hasil tersebut mendukung pernyataan *Lipset*, bahwa tingkat kesadaran berpolitik tergantung *background* pendidikan pelaku politik.

#### 5. Jenis Pekerjaan Wanita Muslim di PKB

Untuk mengetahui apa saja jenis pekerjaan wanita muslim di PKB, peneliti sajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL IV

## Pekeijaan Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kategori A B C D E F						Jumlah N% F %	
		F%	F%	F%	F%	F%	F%		
4	Apakah pekeijaan responden sekarang ini	-	-	3	3	-	2	8	100

Keterangan : A = tidak bekerja  
 B = pegawai negeri  
 C = wiraswasta  
 D = pegawai swasta  
 E = pedagang  
 F = Lain-lain

Ternyata wanita muslim di PKB tidak hanya aktivis partai. Mereka juga bekerja untuk menopang ekonomi keluarga di sela-sela kesibukan keluarga, dan kegiatan partai 37,5% dari mereka adalah wiraswasta, 37,5% sebagai pegawai swasta dan 12,5% menjawab lain-lain tanpa menyebut jenis pekerjaannya.

## 6. Status Ekonomi Wanita Muslim di PKB

Masih menurut pendapat Martin bahwa tingkat ekonomi seseorang juga sangat berpengaruh terhadap keterlibatannya dalam politik. Berikut ini peneliti deskripsikan kondisi ekonomi wanita muslim yang ada di PKB berdasarkan hasil angket

TABEL V

## Tingkat Ekonomi Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kategori				Jumlah N% F %	
		A	B	C	D		

		F%	F%	F%	F%		
4	Berapakah pendapatan keluarga responden secara keseluruhan dalam waktu sehari	3	37,5	- 1	12,5	4 50	8
5	Berapa jumlah tanggungan keluarga responden	3	37,5	2 -	25	4 50	8
6	Bagaimana status rumah yang ditempati responden	5	62,5	1	12,5	2 25	8

Keterangan soal no.4. A: 10.000-30.000

B: 30.000-40.000

C: 40.000-50.000

D: di atas 50.000

Keterangan soal no.5. A: di atas empat orang

B: antara 1-2 orang

C: antara 3-4 orang

D: tidak memiliki tanggungan

Keterangan soal no.6. A: milik sendiri

B: kontrak

C: warisan orang tua

D: menumpang/ngenger

Gambaran tingkat ekonomi wanita di PKB dapat dijabarkan sebagai berikut;

Untuk pendapatan mereka dalam sehari, sebanyak 37,5% berkisar antara Rp.10.000-Rp.30.000, 17,5% berpendapatan antara Rp.40.000-Rp.50.000, dan 50% nya lagi berpendapatan di atas Rp. 50.000 dalam sehari.

Sedang jumlah tanggungan keluarga mereka 37,5% berjumlah di atas empat orang, 25% memiliki tanggungan keluarga antara 1-2 orang, dan 50% belum mempunyai tanggungan. Mereka yang belum mempunyai tanggungan ini adalah mereka yang belum menikah.

Tentang status mmah yang didiami responden, 62,5% diantaranya status rumahnya sudah milk sendiri, 12,5% kontrak, dan 25% masih ikut orang tua.

Dari gambaran umum kondisi ekonomi wanita musim PKB di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat ekonomi mereka lumayan. Ini memunculkan anggapan bahwa dengan kondisi ekonomi yang lumayan, maka kemungkinan untuk melakukan tindak korupsi atau money politic sangat kecil. Didukung pula identitas muslim yang disandang oleh mereka, sehingga praktik-praktek yang melanggar norma-norma agama tidak dilakukan.

TABEL VI

## Indeks Pemilikan Barang Berharga

No. 8. Nama Barang	Punya Tidak Punya			
	F	%	F	%
Mobil	5	62,5	3	37,5
Sepeda Motor	6	75	2	25
Televisi	8	100	-	-
Computer	2	25	6	75
Tape Recorder	8	100	-	-
Radio	8	100	-	-

Tabel di atas mendeskripsikan pemilikan barang berharga wanita di PKB. Dari jumlah responden yang diteliti, 62,5% memiliki mobil sedang 37,5% nya tidak punya. Yang memiliki sepeda motor sebanyak 75% sisanya 25% tidak punya. Barang berharga tape recorder, radio, dan televisi 100% responden memiliki. Sedang computer hanya 25% responden yang memiliki, 75% tidak punya. Jadi, wanita muslim PKB yang memiliki mobil secara keseluruhan juga memiliki barang berharga televisi, tape recorder, dan radio. Sebagian besar mereka juga memiliki sepeda motor, sedang computer hanya sebagian kecil. Kecilnya jumlah yang



memiliki computer bagi mereka yang memiliki mobil, kemungkinan tingkat kebutuhan terhadap computer belum mendesak meskipun harga sepeda motor misalnya, lebih mahal dari harga computer.

## 2. Tujuan Partisipasi Politik Wanita Muslim di Partai Kebangkitan Bangsa

Ada beberapa tujuan partisipasi politik wanita muslim di PKB yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, di antaranya ialah keinginan para aktivis politik wanita ini untuk memberdayakan kaum hawa lewat kancah politik. Menurut mereka, wanita selama ini termarginalkan dari segi apapun, maka mereka terpanggil untuk memberdayakan lewat politik. Satu contoh kecil yang mereka ungkapkan, bahwa jumlah konstituen wanita di Jawa Timur lebih besar daripada laki-laki, tetapi suara mereka hanya cukup diwakili empat orang wanita yang duduk di legislatif, sedang untuk wakil laki-lakinya ada dua puluh tujuh orang dari PKB. Di samping itu mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dunia politik juga sah untuk dimasuki wanita dan mereka juga ingin menunjukkan bahwa wanita juga mampu bersaing dengan laki-laki di pentas politik.<sup>42</sup>

Bagi mereka yang duduk di legislatif pada dasarnya menjadi anggota dewan bukan tujuan utamanya. Walaupun pada akhirnya bisa duduk di kursi legislatif, menurut dia, itu adalah sebuah anugrah tersendiri atau akses dari keberhasilan mereka memenangkan pemilu di daerah pemenangannya.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ibu A'isyah Lilia Agustina, anggota legislatif komisi A dari PKB pada tanggal 16 Mei 2000, tempat di kantor Wilayah PKB Jawa Timur. Ungkapan senada juga dilontarkan Ibu Masruroh, anggota komisi D, tempat wawancara di hotel Utami pada tanggal 10 Juni 2000. Juga ibu Mutafridah Hasan dan ibu Yulia

Ada sebagian lain yang menjawab bahwa keterlibatan mereka di partai bukan sesuatu yang direncanakan. Akan tetapi karena beberapa sebab sehingga mengantarkan mereka aktif di partai. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Luluk Latifah (pengurus PKB biro PSDP), bahwa keterlibatan dia di partai politik hanya faktor kebetulan saja. Malah sebelumnya Ibu Luluk ini tidak interest dengan dunia politik. Tetapi kemudian Ibu Luluk terpaksa aktif di partai politik karena sebagian besar keluarganya (suami dan anak-anaknya) juga aktif di partai politik.<sup>43</sup>

Ketika peneliti menanyakan apakah mereka tidak merasa kesulitan beradaptasi dengan dunia politik, rata-rata mereka menjawab tidak. Meskipun sebelumnya mereka tidak pernah aktif di partai politik (sebagian besar wanita di PKB berlatar belakang dari ormas) namun mereka menganggap bahwa dunia politik sebenarnya tidak jauh beda dengan organisasi masyarakat, karena dalam ormas intrik-intrik politik juga ada, seperti saat pemilihan ketua ormas.<sup>44</sup> Namun demikian ada yang sempat *shocked* awal kali masuk di parpol. Salah satunya adalah Ibu Mutafarridah. Menurut Ibu Mutafarridah (saat ini menjabat Sekretaris Muslimat Wilayah Jawa Timur dan menjadi anggota biro Pemuda di PKB Wilayah Jawa Timur) ormas sangat berbeda dengan dunia politik, karena di ormas lebih

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan bu Luluk Latifah pengurus PSDP, pada tanggal 10 Juni di Hotel Utami Surabaya.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan bu Mutafarridah Hasan, pada tanggal 17 April 2000, bertempat di Kantor Wilayah PKB Jawa Timur. Hal senada diungkapkan Bu A'isyah Lilia Agustina.

mengedepankan sisi-sisi sosialnya sedang di parpol orientasi kekuasaan lebih menonjol. Kawan bisa jadi lawan untuk urusan politik.<sup>45</sup>

### 3. Identifikasi Partisipasi Politik

#### a. Partisipasi dalam Pemilihan Umum

Berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah salah satu indikator bagi seseorang untuk disebut partisipan politik. Untuk mengetahui partisipasi politik wanita- wanita muslim di PKB, peneliti sajikan dalam tabd berikut ini

TABEL VII

#### Partiapasi dalam Pemilihan Umum

No	Jenis Pertanyaan	Kategori			Jumlah N% F %
		A F %	B F %	C F %	
9	Ap akali responden selalu memberikan suara dalam pemilu	8 100	- - - -	-	8 100
10	Apakah pernah menghadiri atau ikut kampanye	6 75	2 25	-	8 100
11	Apakah pernah mempengaruhi orang lain untuk mencoblos	6 75	2 25	- -	8 100
12	Apakah pernah membantu kontestan dalam pemilu spt.meinasang tanda gambar	4 50	2 25	2 25	8 100

Keterangan    A: sering/sdalu  
                       B: kadang-kadang  
                       C: tidak pernah

---

<sup>45</sup> Wawancara bersama ibu Mutafamdah, pada tanggal 17 April 2000 di Kantor "Wilayah PKB Jawa timur.

Partisipasi dalam Pemilihan Umum wanita muslim di PKB berdasarkan tabel di atas, 100% responden selalu memberikan suara dalam pemilu, 75% responden sering ikut kampanye 25% kadang-kadang ikut kampanye. Tentang tingkat keseringan mempengaruhi orang lain untuk mencoblos 75% menjawab sering, 25% menjawab kadang-kadang. Untuk membantu kontestan memasang tanda gambar, bendera dan atribut lainnya 50% menjawab sering, 25% kadang-kadang dan 25% tidak pernah.

Data angket tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa wanita muslim di PKB, bahwa partisipasi mereka dalam pemilu benar-benar *all out*. Pernyataan ini mereka berikan contoh dengan keterlibatan mereka sebagai juru kampanye partai di beberapa daerah di Jawa Timur. Sosialisasi politik juga telah mereka lakukan khususnya bagi wanita-wanita di daerah-daerah kecil dengan memberikan pemahaman politik atau pendidikan politik. Secara umum partisipasi politik wanita muslim PKB dalam Pemilu termasuk partisipasi tinggi, karena keterlibatan yang intens yang berkaitan dengan Pemilu mayoritas mereka ikuti.

#### b. Partisipasi dalam Internal Organisasi

Tingkat intensitas anggota dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan partai juga menjadi indikator partisipasi politik anggota tersebut Hal ini sebagaimana yang dipaparkan Bernie Axford et.al., dalam bukunya '*Politics: An introduction*', bahwa keaktifan dalam keanggotaan organisasi menjadi *main type* dari partisipasi politik<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Banie Axford, et.al, *Politics: An introduction* (London: Routledge, 1997), 110.

Maka untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi wanita-wanita di PKB dalam intern organisasi peneliti deskripsikan dalam tabel berikut.

TABEL VII

## Partisipasi dalam Internal Organisasi

No	Jenis Pertanyaan	Kategori						Jumlah N % F %	
		A		B		C			
		F	%	F	%	F	%		
13	Apakah responden aktif menghadiri rapat organisasi	7	87,5	2	12,5	-	-	8	100
14	Untuk jawaban ya, apakah responden pernah mengajukan usul pada rapat organisasi	5	62,5	3	37,5	-	-	8	100
15	Apakah responden pernah memberikan bantuan materi pada organisasi	5	87,5	3	37,5	-	-	8	100
16	Apakah responden pernah mempengaruhi anggota lain dalam pembuatan keputusan di organisasi	3	37,5	3	37,5	2	25	8	100

Keterangan    A: sering/seialu  
                       B: kadang-kadang  
                       C: tidak pernah

Tabel di atas menunjukkan wanita muslim PKB yang sering menghadiri rapat organisasi sebanyak 87,5%, dan hanya 12,5% yang menjawab kadang-kadang. Ketika menghadiri rapat, sebanyak 62,5% menyatakan sering mengajukan usul, 37,5% menyatakan kadang-kadang. Memberikan bantuan materi kepada organisasi, sebanyak 62,5% menyatakan sering memberi, 37,5% menjawab kadang-kadang.

Menjawab pertanyaan tentang keseringan responden mempengaruhi anggota lain dalam pembuatan keputusan organisasi, sebanyak 37,5% menjawab sering,

kadang-kadang sebanyak 37,5%, dan yang menjawab tidak pernah 25%. Hasil yang dapat ditarik dari partisipasi politik wanita muslim di PKB dalam internal organisasi tergolong partisipasi berkelanjutan, karena partisipasi mereka tidak hanya sebatas waktu pemilu saja, akan tetapi mereka juga terlibat aktif dengan kegiatan organisasi.

### c. Partisipasi dalam Lobby Pemerintah atau Eksternal Organisasi

Adalah aktifitas responden dalam melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintah atau elit politik untuk tujuan mempengaruhi keputusan yang menyangkut kepentingan umum atau mengadakan kontak khusus baik langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa indikator yang termasuk partisipasi dalam loby pemerintah atau eksternal organisasi, untuk mengetahui bagaimana partisipasi wanita di PKB dalam melakukan loby pemerintah adalah:

TABEL IX

#### Partisipasi dalam Lobby Pemerintah atau Eksternal Organisasi

No	Jenis Pertanyaan	Kategori						Jumlah N% F %	
		A		B		C			
		F	%	F	%	F	%		
17	Apakah responden pernah meng- ajukan usul kepada pemerintah	2	25	3	37,5	3	37,5	8	100
18	Apakah responden pernah mengadakan pertemuan dengan pejabat pemerinlah	4	50	4	50	-	-	8	100
19	Apakah responden pernah meng duarkan uang untuk memperlan car usulan kepada pemerintah	-	-	-	-	8	100	8	100
	Apakah responden pernah mem- pengaruhi orang lain sehubung- an dengan issu yang berkembang dan dapat	2	25	5	62,5	2	25	8	100

	mempengaruhi kebijakan pemerintah		
--	-----------------------------------	--	--

Keterangan    A: sering/selalu  
                      B: kadang-kadang  
                      C: tidak pernah

Paitisipasi wanita muslim di PKB dalam melakukan loby pemerintah atau eksternal organisasi menurut hasil angket diketahui bahwa 25% sering mengajukan usul pada pemerintah, 37,5% menjawab kadang-kadang, dan 37,5% menjawab tidak pernah. Pertemuan dengan pejabat pemerintah yang menjawab sering sebanyak 50%, dan yang menjawab kadang-kadang 50%. Praktek *money politic* untuk memperlancar usulan pada pemerintah, bagi wanita PKB adalah sesuatu yang melanggar norma agama maupun aturan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam menjawab pertanyaan ini 100% menjawab tidak pernah mengeluarkan uang untuk memperlancar usulan kepada pemerintah Pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan melalui angket adalah tingkat keseringan responden dalam mempengaruhi orang lain sehubungan dengan isu yang berkembang dan dapat mempengaruhi kebijakan politik. 25% dari mereka menjawab sering 50% menjawab kadang-kadang, dan 25% menjawab tidak pernah.

Data angket di atas didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa wanita muslim di PKB, di antaranya dengan Ibu A'isyah Lilia yang kebetulan menjadi anggota legislatif DPRD Tingkat I Jawa Timur di Komisi A. Ibu A'isyah melalui Komisinya sering melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintah. Pada moment ini Ibu A'isyah sering memberikan usulan-usulan kepada pemerintah, misalnya tentang pemberdayaan perempuan di Jawa Timur sebagai

konstituen terbesar selayaknya mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah. Ibu A'isyah juga getol memperjuangkan representasi keterwakilan wanita di lembaga legislatif. Menurut Ibu A'isyah, representasi keterwakilan wanita di legislatif masih sangat kurang. Dengan jumlah konstituen yang lebih besar dari laki-laki ^seharusnya jumlah anggota legislatif dari wanita lebih besar dari laki-laki. Namun sebaliknya, dari jumlah total anggota legislatif liga puluh satu orang dari PKB, wanita hanya mendapatkan jatah empat orang Kondisi ini menurut Ibu A'isyah membuktikan bahwa wanita memang selalu dikalahkan oleh laki-laki. Hak-hak wanita dalam politik (pembagian jatah anggota Dewan) telah dirampas oleh kaum laki-laki, dan ini harus direbut oleh wanita, menurutnya.<sup>47</sup> Walaupun Ibu A'isyah sering melakukan pertemuan dengan pejabat dan mengajukan usul, akan tetapi Ibu A'isyah tidak panah mengeluarkan uang kepada pemerintah untuk mengegolkan usulan-usulan yang disampaikan

Demikian juga yang telah dilakukan Ibu Masruroh anggota Komisi D. Keterlibatan Ibu Masruroh di legislatif dijadikan sarana untuk meningkatkan harkat wanita Usulan-usulan pemberdayaan perempuan juga telah disampaikan pada pemerintah, walaupun respon kongkrit dari pihak pemerintah belum sepenuhnya terealisasi.<sup>48</sup>

## **B. Partisipasi Politik Wanita Muslim di Partai Bulan Bintang**

---

<sup>47</sup> Wawancara bersama ibu A'isyah, pada tanggal 17 April 2000, di Kantor Wilayah PKB Jawa Timur.

<sup>48</sup> Wawancara bersama ibu Masruroh, pada tanggal 10 Juni 2000, bertempat di hotel Utami Surabaya.



### 1. Gambaran Umum Wanita di Partai Bulan Bintang

Berbeda dengan wanita yang aktif di PKB yang sebagian besar dari ormas-ormas NU, wanita yang bergabung dengan Partai Bulan Bintang sangat beragam. Ada sebagian yang *background* organisasinya dari Muhammadiyah dan ada sebagian yang aktif di organisasi sosial wanita Islam non NU atau non Muhammadiyah. Jika diambil prosentasenya, memang lebih besar dari unsur Muhammadiyahnya. Ini terlihat dari beberapa pengurus wanita di PBB juga aktif di kepengurusan A'isyiyah.

Partai PBB juga bisa dikatakan sebagai partai yang memiliki link historis dengan Masyumi sehingga sebagian besar mereka adalah keluarga besar Masyumi terimbas politik orde lama dan akhirnya tergusur dari percaturan politik masa itu. Peneliti sempat mewawancari Ibu Tamat Anshory (saat ini Ibu Tamat juga aktif di PD. A'isyiyah) tentang latar belakang Ibu Tamat memutuskan untuk aktif di PBB, ternyata keterlibatannya di PBB karena keluarga Ibu Tamat waktu Masyumi berjaya adalah aktivis Masyumi. Sehingga pada saat PBB lahir dan mendeklarasikan diri sebagai partai penerus Masyumi Ibu Tamat memutuskan untuk bergabung dengan PBB.<sup>49</sup> Iffatin Nasyi'ah memutuskan aktif di PBB karena tertarik dengan program-program yang ada di PBB.<sup>50</sup> Pada pemilu 1999, PBB belum bisa mengantarkan wakil dari wanita untuk duduk di lembaga legislatif. Meskipun tidak ada wakil wanita yang duduk di lembaga legislatif, akan tetapi loby-loby

---

<sup>49</sup> Wawancara bersama Ibu Tamat Anshory, pada tanggal 18 Mei 2000, di Masjid al-Hilal Surabaya.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Iffatin Nasyi'ah, pada tanggal 18 Mei 2000, di Masjid al-Hilal Surabaya

eksternal organisasi tetap bisa dilakukan melalui dialog-dalog personal dengan pejabat pemerintah.

Dalam struktur PBB terbagi menjadi beberapa bagian (sub bidang garap organisasi, seperti halnya biro yang ada di PKB) yaitu bagian Ulama' dan Cendekiawan, bagian Politik dan Humas, bagian Pendidikan dan IPTEK, bagian Industri Perdagangan dan Jasa, bagian Tani dan Nelayan, bagian Tenaga Kerja dan Administrasi, bagian Lingkungan Hidup, bagian Sosial dan Budaya, bagian Kader dan Organisasi, dan bagian Hukum dan Advokasi. Nama-nama wanita yang masuk dalam kepengurusan PBB Wilayah Jawa Timur adalah Wakil Ketua, yang mengkoordinir bagian organisasi wanita yaitu Muslimat, wakil sekretaris yang secara otomatis menjadi koordinator sekretaris Muslimat, satu orang wanita di bagian Pendidikan dan IPTEK, satu orang di bagian Sosial dan Budaya, dan satu orang di bagian kader dan organisasi. Untuk bidang-bidang lain selain tiga bidang yang disebut terakhir wanita tidak terakomodir disana. Sehingga mayoritas wanita muslim di PBB lebih intens di kegiatan yang diselenggarakan Muslimat. Muslimat ini adalah lembaga semi otonom yang ada di PBB yang dikhususkan bagi wanita. Sehingga gerak langkah wanita yang ada di PBB cukup leluasa dan bebas. Program-program yang digarap tidak hanya permasalahan wanita an sich. tetapi bidang garap Muslimat tidak jauh beda dengan bidang garap PBB Wilayah Jawa Timur.

Dari beberapa pertemuan yang diselenggarakan oleh wanita muslim di PBB, peneliti melihat bahwa wanita muslim di partai ini cukup solid. Agenda kegiatan yang direncanakan sudah cukup tertata. Setiap seminggu dua kali ada kegiatan rutin yang dikonsumsi bagi wanita yang aktif di PBB.

Meskipun sebagai lembaga semi otonom, kegiatan-kegiatan Muslimat hanya dikonsumsi bagi wanita. Program-program tersebut meliputi: pertama, politik dan pemerintahan, yaitu mengupayakan percepatan proses terlaksananya otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara konsisten, aspiratif dan proporsional. Kedua, hukum yaitu berusaha mentransfernya dalam percaturan politik yang Islami pada peraturan daerah, membangun dan mendukung penegakan hukum dan sistem peraturan daerah yang berpihak kepada kebenaran dan berdimensi keadilan, mengevaluasi dan meninjau peraturan-peraturan daerah yang tidak relevan dengan kondisi sosial (relegius) dan kebutuhan serta perkembangan pemerintahan dan masyarakat, serta mendorong pendidikan hukum untuk kesadaran dan pemahaman wanita terhadap hukum. Ketiga, ekonomi, yaitu meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan sumber daya tiap daerah, mengembangkan ekonomi pedesaan sebagai sentra pertanian (termasuk peternakan dan perikanan) dan industri, meningkatkan kemampuan pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang produksi, pendanaan usaha dan pemasaran di dalam dan luar negeri, mengupayakan terjalinnya hubungan kerjasama usaha antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan menengah, serta mengembangkan lembaga keuangan pedesaan yang menerapkan prinsip *Free Interest System*.

Keempat, lingkungan hidup, yaitu mengutamakan kegiatan pembangunan di daerah yang mengolah sumber daya alam yang tersedia dan dapat didaur ulang serta dapat berkelanjutan, meningkatkan pengawasan pengolahan sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang dengan prinsip efisiensi yang tinggi dan resiko

dampak lingkungan yang paling minimal, melakukan pengetatan terhadap amdal dan audit lingkungan pada semua eksploitasi sumber daya alam dalam skala menengah dan besar, membangun dan memberdayakan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam rangka mengembangkan kesadaran terhadap pelestarian dan keharmonisan lingkungan hidup, serta secara aktif mendukung penegakan hukum lingkungan hidup secara tegas dan konsisten. Kelima, ketenagakerjaan, yaitu sistem pengupahan karyawan ditirukan kepada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak yang didasarkan pada kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan yang layak. Jadi tidak didasarkan pada kebutuhan fisik minimum. Karyawan perlu mendapatkan bagian saham dalam perusahaan agar mereka mempunyai rasa memiliki atas perusahaan tersebut, perbandingan gaji yang standar antara tingkat management dengan pekerja yang paling rendah agar tidak terjadi kesenjangan sosial di bidang pendapatan, peningkatan jaminan kesehatan hari tua dengan pendayagunaan asuransi tenaga kerja serta jaminan perumahan, setiap karyawan harus diberikan kesempatan yang sama dalam berkarir dan memperoleh pendapatan, serta memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja wanita sesuai kodratnya dan perlindungan hukum atas pekerja anak-anak dan cacat fisik. Keenam, pendidikan, yaitu mengusahakan pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh siswa SD yang berprestasi, bersumber dari dana APBD dan seluruh siswa SLTP dan SMU yang berprestasi dari APBD Propinsi, memberikan subsidi kepada operasional sekolah dan gaji guru pada lembaga pendidikan swasta di pedesaan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Propinsi, menyediakan guru agama bagi sekolah negeri dan swasta umum maupun kejuruan, serta mengembangkan

pendidikan kejuruan bagi siswa putus sekolah sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang tersedia di dalam dan luar daerah serta luar negeri. Ketujuh, tani dan nelayan, yaitu meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk usaha pertanian yang ekonomis, produktif untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan kapasitas produksi usaha nelayan dengan peningkatan pembinaan sumber daya manusia dan meningkatkan pengguna teknologi tepat guna bagi pengembangan, pengolahan dan pemasukan hasil laut, membangun lembaga usaha bagi ndayan kecil/tradisional, pemberdayaan institusi pertanian/perkebunan/perikanan lebih produktif, inovatif dan kondusif, menghapus sistem monopoli, oligopoli dengan mewujudkan pemerataan dan keadilan, mewujudkan sistem birokrasi yang lebih profesional efisien dalam bidang perdagangan (export/import), subsidi dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan dalam bentuk pupuk, bibit, obat-obatan serta sarana transportasi, Kredit Usaha Tani diusahakan lebih lunak (bunga sangat ringan) sebagaimana yang berlaku di negara lain (Malaysia, Jepang).

Dari beberapa rancangan program di atas, belum sepenuhnya dilakukan dalam praktek nyata. Untuk saat ini, baru tahap sosialisasi kegiatan-kegiatan di daerah-daerah.

## 2. Usia Wanita yang Aktif di Partai Bulan Bhtang

Berdasarkan pengamatan peneliti, usia wanita muslim yang aktif di DPW PBB cukup beragam Sebagian dari mereka usianya masih relatif muda, dan selebihnya adalah wanita dewasa (di atas 45 tahun). Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini.

TABEL I  
Umur Responden

No	Jenis Pertanyaan	Umur Responden				Jumlah N%	
		25-35 F %	36-45 F' %	46-55 F %	56-65 F %	F	%
1	Berapakah umur responden	4 50	-	3 37,5	1 12*5	8	100

Dari label di atas dapat diketahui bahwa usia wanita yang aktif di PBB adalah 50% masih berusia 25-35 tahun, 37,5% berusia antara 46-55 tahun, dan 12,5% berusia 56-65 tahun. Jumlah usia muda yang dominan di partai ini menunjukkan tingginya tingkat kesadaran wanita muslim muda untuk aktif di parpol. Dan yang jelas, faktor usia bukan penentu kemenangan dan keberhasilan partai, akan tetapi faktor penentunya adalah tingkat partisipasi pelaku politik tersebut baik dalam Pemilu, internal organisasi, maupun eksternal organisasi.

### 3. Status Perkawinan Responden

Tiga opsi jawaban yang peneliti berikan untuk mengetahui status perkawinan wanita muslim yang aktif di PBB. yaitu kawin, janda, dan tidak (belum) kawin. Untuk mengetahui jawaban pertanyaan tentang status perkawinan mereka, tabel berikut menggambarkan keadaan tersebut.

TABEL II  
Status Perkawinan

No	Jenis Pertanyaan	Jawaban						Jumlah N%	
		Kawin F %	Janda F %	Tidak kawin F %				F	%
2	Status perkawinan	4 50	- -	4 50				8	100

Jumlah wanita yang aktif di DPW PBB Jawa Timur yang sudah menikah sebanyak 50%, demikian juga yang belum menikah sebanyak 50%. Keadaan ini menunjukkan bahwa semangat untuk terlibat di parpol tidak menjadi dominasi wanita yang sudah berkeluarga, akan tetapi mereka yang belum menikah dan relatif masih muda juga memiliki semangat yang sama untuk aktif di parpol.

#### 4. Tingkat Pendidikan Wanita Muslim di PBB

Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mengetahui tingkat partisipasi politik. Sebelum mengetahui bagaimana tingkat partisipasi wanita muslim di PBB, maka sebaiknya mengetahui lebih awal *background* pendidikan mereka. Tabel berikut memaparkan keadaan tersebut.

TABEL III

Tingkat Pendidikan Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kategori								Jumlah N % F %	
		A		B		C		D			
		F	%	F	%	F	%	F	%		
3	Apakah pendidikan formal terakhir responden	2	2	5	6	75	-	-	8	100	

Keterangan    A: SLTP  
                      B: SLTA  
                      C: Perguruan Tinggi  
                      D: Lain-lain

Jumlah lulusan Perguruan Tinggi lebih dominan pada wanita muslim di PBB. Rincian data angket di atas menunjukkan 75% wanita muslim PBB lulus Perguruan Tinggi, dan hanya 25% yang lulus SLTA. Ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi bagi wanita muslim di PBB yang lulus dari Perguruan Tinggi untuk masuk sebagai aktivis partai.

### 5. Pekerjaan Wanita Muslim di PBB

Wanita bekerja, hal yang biasa pada era kesetaraan gender saat ini. Begitu juga wanita muslim di PBB, mereka tidak hanya sebagai aktivis partai, akan tetapi mereka juga mempunyai kesibukan yang dapat menambah *income* keluarga. Berikut ini data pekerjaan wanita (i PBB.

TABEL IV

Pekerjaan Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kategori						Jumlah N% F %	
		A F %	B F %	C F %	D F %	E F %	F F %		
4	Apakah pekerjaan responden sekarang	1 12,5	- -	3 37,5	1 12,5	- -	3 37,5	8	100

Keterangan    A: Tidak bekerja  
                      B: Pegawai Negeri  
                      C: Wiraswasta  
                      D: Pegawai Swasta  
                      R: Pedagang  
                      F: Lain-lain

Data angket di atas menunjukkan bahwa hanya 12,5% wanita muslim PBB yang tidak bekerja, 37,5% wiraswasta, 12,5% pegawai swasta, dan 37,5% menjawab lain- lain.

### 6. Status Ekonomi Wanita Muslim di PBB

Tingkatan ekonomi seseorang sangat berpengaruh terhadap keaktifannya di partai. Dalam melakukan aktivitas partai tidak ada sistem penggajian layaknya pegawai negeri. Maka dalam menjalankan kegiatan partai (misal: menghadiri rapat,



kampanye), sebagian besar dana dikeluarkan dari saku sendiri. Ini berarti wanita yang memutuskan intrik aktif di partai harus memiliki anggaran ekstra di samping kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk mengetahui kondisi ekonomi wanita muslim PBB, lihat tabel berikut.

TABEL V

## Tingkat Ekonomi Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kategori								Jumlah N%	
		A		B		C		D			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
5	Berapakah pendapatan keluarga responden secara keseluruhan dalam waktu sehari	4	50	2	25	-	-	2	25	8	100
6	Berapakah jumlah tanggungan keluarga	2	25	1	12,5	2	25	3	37,5	8	100
7	Bagaimana status rumah responden	4	50	1	12,5	-	-	3	37,5	8	100

Keterangan soal no. 5. A: Rp. 10.000-Rp. 30.000

B: Rp. 30.000-Rp. 40.000

C: Rp. 40.000-Rp. 50.000

D: Rp. Di atas Rp.50.000

Keterangan soal no.6. A: di atas empat orang .

B: antara 1-2 orang

C: antara 3-4 orang

D: tidak memiliki tanggungan

Keterangan soal no.7. A: milik sendiri

B: kontrak

C: warisan orang tua

D: menumpang/ngcnger

Tabel di atas menunjukkan keadaan tingkat ekonomi wanita di PBB. Dapat diketahui bahwa pendapatan mereka dalam sehari Rp.10.000-Rp.30.000 sebanyak 50% antara Rp.30.000-40.000 sebanyak 25%, dan 25% lainnya berpenghasilan di atas Rp.50.000. Jumlah tanggungan keluarga masing-masing responden, sebanyak 25% di atas empat orang, 12,5% antara 1-2 orang, antara 3-4 orang 25%, dan 37,5% tidak memiliki tanggungan. Sedangkan status rumah responden, 50% sudah milik sendiri, 12,5% kontrak, dan 37,5% masih menumpang orang tua

TABEL VI

## Indeks Pemilikan Barang Berharga

No	Nama Barang	Punya F %	Tidak Punya F %	Jumlah % F %
8	Mobil	2 25	6 67,5	8 100
	Sepeda motor	8 100	- -	8 100
	Televisi	8 100	- -	8 100
	Computer	1 12,5	7 87,5	8 100
	Tape recorder	8 100	- -	8 100
	Radio	8 100	- -	8 100

Tabel di atas menjelaskan tentang barang-barang berharga yang dimiliki dan tidak dimiliki wanita muslim PBB. Dari jumlah responden yang memiliki mobil 25% sedang 75% nya tidak punya mobil. Yang memiliki sepeda motor, televisi, dan radio sebanyak 100% sedang yang memiliki computer hanya 12,5% sisanya 87,5% tidak memiliki computer.

Dari gambaran tingkat ekonomi di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat ekonomi wanita muslim PBB relatif lebih rendah dibandingkan wanita muslim PKB. Meskipun kondisi umum ekonomi mereka lebih rendah dari PKB, akan tetapi hal yang perlu diingat dari kondisi ini adalah banyaknya jumlah wanita usia muda

yang aktif di PBB. Dan yang jdas mereka belum mempunyai tanggungan untuk keluarga. Jadi wajar, jika hasil angket yang diperoleh demikian adanya

#### 7. Tujuan Partisipasi Poitik Wanita Muslim di Partai Bulai Bintang

Tujuan keterlibatan wanita muslin di PBB sangat beragam sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa responden. Menurut Ibu Irena Handono (Ketua Umum Muslimat PBB Wilayah Jawa Timur), tujuannya terlibat di Partai Bulan Bintang *pertama*, karena Islam tidak melarang wanita untuk aktif sebagai politisi, maka Ibu Irena ingin menunjukkan hal itu dan wanita juga mampu melakukannya. *Kedua*, Ibu Irena ingin meningkatkan harkat dan martabat wanita yang selama ini tersubordinasi melalui jalur politik. *Ketiga*, mengapa pilihannya jatuh ke PBB, Ibu Irena memberikan alasan karena PBB lebih mengedepankan visi dan misi Islam.<sup>51</sup> Sementara Ibu Tamat Anshory memberikan alasan, bahwa sebenarnya ia tidak tertarik di dunia politik. Satu kebetulan suaminya aktif di PBB (salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dari PBB), maka Ibu Tamat akhirnya masuk di PBB dan aktif di Muslimat-nya.<sup>52</sup>

Berbeda dengan Iffatin Nasyi'ah, tujuannya aktif di PBB, pertama kali karena ia tertarik dengan kegiatan yang diselenggarakan PBB. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan PBB bernuansa Islami, menurut dia. Orientasi kekuasaan tidak pernah terlintas di benaknya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara bersama ibu Irena Handono, pada tanggal 1 Juni 2000, bertempat di Masjid al-Hilal Surabaya.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tamat Anshory, pada tanggal 1 Juni 2000, bertempat di Masjid al-Hilal Surabaya

<sup>53</sup> Wawancara dengan Iffatin Nasyi'ah, pada tanggal 1 Juni 2000, bertempat di Masjid al-Hilal Surabaya.

Sedang Ibu Mu'awanah tujuannya adalah ingin mensyiarkan Islam lewat politik. Dan wadah yang tepat menurutnya adalah lewat parpol PBB, karena PBB adalah partai yang benar-benar mengemban misi Islam, bukan partai sekuler. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa PBB adalah partai yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, Islam adalah Islam yang tidak bisa dicampuradukkan dengan kepentingan-kepentingan lain dengan mengakomodir kelompok yang bukan Islam<sup>54</sup>

## 8. Identifikasi Partisipasi Politik

### a. Partisipasi dalam Pemilihan Umum

Salah satu tipe utama bagi partisipan politik adalah partisipasinya dalam Pemilihan Umum Indikatornya tidak hanya mencoblos tanda gambar di saat hari 'H' Pemilu saja, akan tetapi keikutsertaannya dalam menghadiri kegiatan kampanye, mempengaruhi orang lain untuk mencoblos partai yang dipilihnya, serta keikutsertaannya dalam membantu kontestan untuk memasang bendera, tanda gambar, dan atribut partai lainnya. Untuk mengetahui partisipasi politik wanita muslim PBB dalam Pemilu, tabel berikut menjelaskan keadaan tersebut.

TABEL VII

### Partisipasi dalam Pemilihan Umum

No	Jenis Pertanyaan	Kategori						Jumlah N%	
		A		B		C			
		F	%	F	%	F	%	F	%
9	Apakah responden selalu memberikan suara dalam Pemilu	7	87,5	1	12,5	-	-	8	100

<sup>54</sup> Wawancara dengan Mu'awanah, pada tanggal 1 Juni 2000, bertempat di Masjid al-Hilal Surabaya.

10	Apakah pernah ikut kampanye	4	50	3	37,5	1	12,5	8	100
11	Apakah pernah mempengaruhi orang lain untuk mencoblos	6	75	2	25	-	-	8	100
12	Apakah pernah membantu kontestan dalam Pemilu spt Memasang tanda gambar,dll.	4	50	4	50	-	-	8	100

Keterangan    A: sering/selalu  
                       B: kadang-kadang  
                       C: tidak pernah

Dari hasil angket di atas diketahui bahwa partisipasi wanita muslim PBB dalam membelikan suara di saat Pemilu 87,5%, dan yang menjawab kadang-kadang 12,5%. Tentang tingkat keseringan menakuti kampanye sebanyak 50% menjawab sering, 37,5% menjawab kadang-kadang, dan 12,5% menjawab tidak pernah.

Sedang partisipasi mereka dalam mempengaruhi orang lain untuk mencoblos 75% menjawab sering, dan 25% menjawab kadang-kadang. Dalam membantu kontestan memasang tanda gambar, bendera, dan lainnya pada saat Pemilu 50% responden menjawab sering, dan 50% nya menjawab kadang-kadang. Secara umum hasil perolehan tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wanita muslim PBB tergolong tinggi. Hasil Partisipasi politik dalam Pemilu yang tinggi ini kemungkinan berkaitan dengan kondisi PBB sendiri, yang membutuhkan keterlibatan aktif para fungsionaris PBB untuk mensosialisasikan PBB yang termasuk partai baru.

Hasil angket di atas juga didukung hasil wawancara peneliti dengan beberapa politisi wanita PBB, seperti yang diungkapkan Ibu Irena, bahwa keterlibatannya dalam kampanye partai tahun 1999 benar-benar diupayakan maksimal. Apalagi PBB adalah partai baru yang membutuhkan intensitas pengurusnya untuk mensosialisasikan ke daerah-daerah yang belum begitu jelas dengan partai-partai

kontestan pemilu 1999 yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan upaya ini juga dilakukan melalui *door to door* untuk mengambil simpati masyarakat untuk memilih PBB.

b. Partisipasi dalam Internal Organisasi

Terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan partai merupakan bukti partisipasi politik. Berikut ini partisipasi wanita PBB dalam mengikuti kegiatan internal organisasi.

TABEL VIII

Partisipasi dalam Internal Organisasi

No	Jenis Pertanyaan	Kategori						Jumlah N% F %	
		A F %		B F %		C F %			
13	Apakah responden aktif menghadiri rapat organisasi	6	75	2	25	-		8	100
14	Untuk jawaban ya, apakah responden pernah mengajukan usul pada rapat organisasi	4	50	4	50	-		8	100
15	Apakah responden pernah memberikan bantuan materi pada organisasi	2	25	6	75	-		8	100
14	Apakah responden pernah mempengaruhi anggota lain dalam pembuatan keputusan di organisasi	3	37,5	5	62,5	-		8	100

Keterangan    A: sering  
                      B: kadang-kadang  
                      C: tidak pernah

Dari hasil angket di atas menunjukkan tingkat keaktifan wanita PBB menghadiri rapat organisasi sebanyak 75%, dan yang kadang-kadang hadir 25%.

Mengajukan usul pada saat rapat organisasi 50% responden menyatakan sering, dan 50% kadang-kadang. Dalam memberikan sumbangan materi pada organisasi 25% menjawab sering, 75% menjawab kadang-kadang. Sedang aktifitas responden dalam mempengaruhi anggota lain dalam pembuatan keputusan di organisasi 37,5% menyatakan sering, 62,5% menyatakan kadang-kadang. Partisipasi politik wanita muslim PBB dalam internal organisasi termasuk partisipasi berkesinambungan. Mereka tidak hanya berhenti pada aktivitas menjelang Pemilu, akan tetapi secara kontinyu mereka juga aktif di organisasi.

c. Partisipasi dalam Lobby Pemerintah atau Eksternal Organisasi

Karena politik lebih berdekatan dengan kekuasaan, maka untuk mengetahui partisipasi politik wanita muslim PBB salah satu parameternya adalah aktifitas mereka dalam melakukan kontak khusus baik langsung atau tidak dengan pejabat pemerintah. Tabel di bawah ini menunjukkan partisipasi wanita muslim PBB dalam melakukan loby pemerintah atau eksternal organisasi.

TABEL IX

Partisipasi dalam Lobby Pemerintah atau Eksternal Organisasi

No	Jenis Pertanyaan	Kategori ABC						Jumlah N%	
		F	%	F	%	F	%		
17	Apakah responden pernah mengajukan usul pada pemerintah	1	12,5	4	50	3	37,5	8	100
18	Apakah pernah mengadakan pertemuan dengan pejabat	2	25	5	62,5	1	12,5	8	100
19	Apakah pernah mengeluarkan uang untuk memperlancar urusan kepada pemerintah					8	100	8	100
20	Apakah pernah mempengaruhi orang lain sehubungan dengan isu	2	25	50	25	100		8	100

	yang berkembang, dan dapat mempengaruhi kebijakan publik		
--	--	--	--

Keterangan A: sering/sdalu  
B: kadang-kadang  
C: tidak pernah

Partisipasi wanita muslim di PBB dalam melakukan loby pemerintah atau eksternal organisasi menurut hasil angket menunjukkan bahwa 12,5% dan mereka sering mengajukan usul pada pemerintah, 50% kadang-kadang saja, dan 37,5% menyatakan tidak pernah. Tingkat keseringan melakukan pertemuan dengan pejabat 25% menjawab sering, 62,5% menjawab kadang-kadang, dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 12,5% saja.

Dalam mengajukan usul pada pemerintah, 100% wanita muslim PBB menyatakan tidak pernah mengeluarkan uang. Sedang pada pertanyaan terakhir, yaitu aktivitas mempengaruhi orang lain sehubungan dengan isu yang berkembang dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, 25% menyatakan sering melakukannya, 50% menjawab kadang-kadang, dan 25% menjawab tidak pernah.

Data angket di atas didukung dengan hasil wawancara bersama Ibu Irena, bahwa secara pribadi Ibu Irena sering melakukan pertemuan maupun mengajukan usul pada pemerintah. Bentuk-bentuk usulan yang Ibu Irena ajukan salah satunya adalah pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Sebagai komunitas terbesar di Indonesia wanita layak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Irena Handono, pada tanggal 1 Juni, di Masjid al-Bilal Surabaya.



### **C. Partisipasi Politik Wanita Muslim di Partai Amanat Nasional**

#### **1. Gambaran Umum Wanita Muslim di Partai Amanat Nasional**

Di Partai Amanat Nasional mayoritas wanita muslim yang aktif adalah wanita yang juga aktif di organisasi masyarakat, seperti A'isyiyah dan Wanita Islam (WI). Komposisi wanita muslim di kepengurusan partai tidak jauh berbeda dengan partai lainnya, mereka hanya menjadi bagian kecil dari jumlah yang masuk sebagai pengurus partai.

Pembagian bidang garap Parta Amanat Nasional relatif lebih banyak dari partai lain yang menjadi sample penelitian Ada dua puluh bidang garap di partai ini Istilah bidang garap partai di PAN berbeda dengan PKB yang memakai nama biro, dan PBB yang memakai nama bagian, di PAN istilah yang dipakai adalah departemen. Jadi ada dua puluh departemen yang masuk dalam struktur kepengurusan PAN.

Nama wanita yang masuk dalam susunan pengurus diantaranya pada pengurus harian ada satu orang sebagai wakil ketua yang mengkoordinatori departemen Pemberdayaan Perempuan, dan satu orang wakil bendahara yang membantu tugas bendahara umum partai, sedang jabatan sekretaris pada pengurus harian tidak ada satu wanitapun yang menduduki jabatan tersebut.

Pada Departemen Kader, Keanggotaan dan Organisasi, Departemen Kampanye, Dcpartemen Kebudayaan dan Kesenian, serta Departemen Wirausaha dan Koperasi, masing-masing satu wanita sebagai anggota departemen. Di Departemen Humas/Media Massa, Departemen Buruh Tani dan Nelayan, Departemen Perhubungan/Telekomunikasi, Departemen Sumber Daya Alam dan

Energi, Departemen lingkungan Hidup, Departemen litbang, Departemen Agama, Departemen Perlindungan Konsumen. Departemen Kesehatan, Departemen Pemuda, Departemen Agraria, dan Departemen Iptek tidak ada nama-nama wanita yang terrekruit baik sebagai ketua departemen maupun anggota departemen.

Departemen Pendidikan dan Departemen Hukum dan Keadilan memasukkan dua wanita sebagai anggota departemen, sedang Departemen Sosial empat wanita yang kesemuanya sebagai anggota. Wanita yang memegang kendali ketua departemen hanya Departemen Pemberdayaan Perempuan.

Walaupun ada beberapa wanita yang masuk di departemen selain Departemen Pemberdayaan Perempuan, namun mereka tidak begitu optimal di departemen tersebut Mereka akhirnya terjebak pada kegiatan yang diselenggarakan Departemen Pemberdayaan Perempuan.

Lingkup tugas Departemen Pemberdayaan Perempuan DPW PAN Jawa Timur adalah melakukan fungsi koordinasi dengan DPD dan memberikan laporan secara reguler periodik kepada DPP mengenai kegiatan dalam lingkup DPW dan DPD. Program yang diprioritaskan diantaranya memperjuangkan keadilan, anti kekerasan, peduli terhadap kemajuan wanita, mengangkat isu-isu yang dekat dengan keseharian wanita (klususnya tingkat *grass root*), membentuk Pos Pelayanan Terpadu di setiap daerah sekaligus di fungsikan sebagai *crisis center*, meminta pertanggungjawaban wakil-wakil rakyat dalam komitmen terhadap pemberdayaan dan program kesetaraan wanita secara reguler periodik, secara berkelanjutan mengadakan temu muka dengan pakar terkait sebagai nara sumber untuk upaya aktualisasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi wanita,

melakukan seminar, konperensi, *talk show*, dalam sosialisasi program, penukar pandangan, bekerjasama dengan organisasi terkait lain, memperjuangkan kuota berjenjang bagi keberadaan wanita di lembaga legislatif eksekutif, dan yudikatif sebagai kebijakan partai dalam mengadopsi *affirmative action* sehingga terdapat keseimbangan kesempatan dari tingkat kuota dan penempatan wanita berdasarkan meritokrasi.

Rencana program di atas belum sepenuhnya dapat direalisasikan departemen Pemberdayaan Perempuan DPW PAN Jawa Timur. Hal ini sempat peneliti konfirmasi dengan pengurus Departemen Pemberdayaan Perempuan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dikonsumsi bagi wanita, misalnya kegiatan mingguan, bulanan atau lainnya belum terealisasi. Pada pemilu 1999 DPW PAN Jawa Timur hanya mampu mengantarkan satu wanita menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Timur yang masuk di Komisi E (Kesra).

## 2. Usia Wanita Muslim di Partai Amanat Nasional

Berdasarkan hasil observasi peneliti, usia wanita muslim yang aktif di PAN sebagian besar termasuk klasifikasi wanita dewasa. Hasil observasi tersebut didukung hasil angket yang peneliti sebar kepada responden. Lihat tabel berikut.

TABEL I

### Umur Responden

No	Jenis Pertanyaan	Umur Responden								Jumlah N% F %	
		25-35		36-45		46-55		56-65			
		F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Berapakah umur responden	2	25	3	37,5	1	12,5	2	25	8	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa 25% wanita di PAN berusia antara 25-35 tahun, 37,5% berusia antara 36-45 tahun, 12,5% berusia 46-55 tahun, dan 25% berusia 56-65 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa wanita yang aktif di PAN tergolong wanita yang sudah dewasa. Minimnya jumlah usia muda yang aktif di PAN disebabkan minimnya peluang bagi wanita umumnya dan khususnya bagi wanita muda untuk aktif di partai tersebut.

### 3. Status Perkawinan Responden

Tabel di bawah ini menjelaskan status perkawinan wanita yang aktif di DPW PAN Jawa Timur. Ada tiga jawaban yang peneliti sediakan untuk mengetahui status perkawinan mereka, dan hasil yang didapat dari angket tersebut adalah:

TABEL II  
Status Perkawinan Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kawin Janda Tidak Kawin						Jumlah N%	
		F	%	F	%	F	%	F	%
2	Status perkawinan responden	5	62,5	2	25	1	12,5	8	100

Status perkawinan yang dapat diketahui dari hasil angket di atas adalah 62,5% dengari status kawin, 25% statusnya janda, dan 12,5 % dengan status tidak/belum kawin

### 4. Tingkat Pendidikan Wanita di Partai Amanat Nasional

Pendidikan formal terakhir wanita yang aktif di PAN dapat diperhatikan pada tabel berikut:

TABEL III  
Tingkat Pendidikan Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kategori				Jumlah N% F %	
		A F %	B F %	C F %	D F %		
3	Apakah pendidikan formal terakhir responden	-	2 25	6 75	- -	8	100

Keterangan A: SLTP  
B: SLTA  
C: Perguruan Tinggi  
D: Lain-lain

Tabel tersebut menunjukkan 25% wanita di DPW PAN pendidikan formal terakhir yang ditempuh sampai tingkat SLTA, dan 75% nya tingkat pendidikan terakhirnya sampai Perguruan Tinggi. Gambaran ini tidak jauh berbeda dengan latar belakang pendidikan wanita muslim di PKB dan PBB.

#### 5. Pekerjaan Wanita Muslim di Partai Amanat Nasional

Di samping aktif di partai, wanita-wanita di DPW PAN juga ada yang bekerja. Sebagian kecil juga ada yang tidak bekerja Untuk mengetahui lebih jelas gambaran pekerjaan mereka dan mereka yang tidak bekerja, lihat tabel berikut.

TABEL IV

#### Pekerjaan Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kategori						Jumlah N% F %	
		A F %	B F %	C F %	D F %	E F %	F F %		
4	Apakah pekerjaan responden sekarang ini	2 25	- -	5 62,5	1 12,5	- -	- -	8	100

Keterangan A: tidak bekerja  
B: pegawai negeri  
C: wiraswasta  
D: pegawai swasta  
E: pedagang  
F: lain-lain

Pekerjaan wanita di DPW PAN cukup beragam sebagaimana hasil angket yang menjabarkan bahwa 62,5% mereka berwiraswasta, 12,5% bekerja sebagai pegawai swasta, dan 25% dari mereka tidak bekerja. Dari 25% wanita yang tidak bekerja, mereka adalah pensiunan pegawai.

#### 6. Status Ekonomi Wanita Muslim di Partai Amanat nasional

Untuk mengetahui tingkat ekonomi wanita muslim di DPW PAN Jawa Timur, peneliti memberikan beberapa poin pertanyaan pada daftar angket Jenis-jenis pertanyaan dan jawaban pertanyaan tersebut adalah:

TABEL V

Tingkat Ekonomi Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kategori				Jumlah N%					
		A	B	C	D	F	%				
		F %	F %	F %	F %						
5	Berapakah pendapatan keluarga responden secara keseluruhan dalam waktu sehari	2	25	1	12,5	1	25	4	50	8	100
6	Berapa jumlah tanggungan keluarga responden	1	12,5	3	37,5	3	37,5	1	12,5	8	100
7	Bagaimana status mmah yang ditempati responden	7	87,5	-	-	-	-	1	12,5	8	100

Keterangan soal no.4. A: 10.000-30.000

B: 30.000-40.000

C: 40.000-50.000

D: di atas 50.000

Keterangan soal no.6 A: di atas empat orang

B: antara 1-2 orang

C: antara 3-4 orang

D: tidak memiliki tanggungan

Keterangan soal no.7. A: milik sendiri

B: kontrak .

C: warisan orang tua

D: menumpang/ngenger

Hasil angket di atas menunjukkan pendapatan responden setiap hari antara Rp.10.000-Rp.30.000 sebanyak 25% yang berpenghasilan antara Rp.30.000-Rp.40.000 sebanyak 12,5%, 12,5% nya lagi berpendapatan antara Rp. 40.000-Rp. 50.000, dan yang berpenghasilan di atas Rp.50.000 sebanyak 50%.

Dengan penghasilan sebagaimana terjabar di atas, tanggungan keluarga mereka di atas empat orang 12,5%, tanggungan antara 1-2 orang 37,5% antara 3-4 orang sebanyak 37,5% dan yang tidak memiliki tanggungan sama sekali 12,5%.

Sedang status rumah yang mereka tempati rata-rata rumah mereka sendiri Sesuai hasil angket di atas sebanyak 87,5% menempati rumah sendiri, dan hanya 12,5% yang masih menumpang/ngenger.

Dibanding dengan partai-partai lain yang menjadi sampel penelitian, memang tingkat ekonomi wanita nuslim PAN lebih tinggi. Ini berkaitan dengan jenis pekerjaan yang mereka tekuni sebagian besar berwiraswasta. Dapat disimpulkan bahwa usaha wirasawasta yang mereka tekuni menjanjikan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan kondisi ekonomi yang cukup tinggi, seharusnya mobilitas berorganisasi mereka juga tinggi.

#### TABEL VI

#### Indeks Pemilikan Barang Berharga

No	Nama Barang	Punya		Tidak Punya	
		F	%	F	%
8.	Mobil	6	75	2	25
	Sepeda Motor	5	62,5	3	37,5
	Televisi	8	100	-	-
	Computer	6	75	2	25
	Tape Recorder	8	100	-	-
	Radio	8	100	-	-

Dari tabel tersebut diketahui barang-barang berharga yang dimiliki wanita muslim PAN antara lain: sebanyak 75% memiliki mobil 25% menjawab tidak punya, yang memiliki sepeda motor sebanyak 62,5% sedang yang 37,5% tidak punya, yang memiliki cornputer 75% dan sisanya 25% tidak punya computer. Untuk barang l>erharga radio, televisi, dan tape recorder, sebanyak 100% responden mergawab punya. Jadi, jumlah wanita muslim yang memiliki mobil, sebagian besar mereka juga memiliki barang berharga seperti sepeda motor, computer, televisi, tape recorder, dan radio.

#### 7. Tujuan Partisipasi Politik Wanita Muslim di Partai Amanat Nasional

Tujuan partisipasi politik wanita muslim di PAN berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama politisi wanita PAN Jawa Timur cukup beragam. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nadlifah Jufri, bahwa tujuan Ibu Nadlifah terlibat di parpol bermula dari rasa simpatinya yang mendalam kepada Bapak Amin Rais (Ketua Umum DPP PAN) sehingga Ibu Nadlifah merasa terpanggil untuk mengegolkan Bapak Amin sebagai Presiden karena beliau termasuk salah satu



kandidat presiden. Dari salah satu keputusan Ibu Nadlifah, untuk mewujudkan keinginan tersebut ia melibatkan diri di panggung politik.<sup>56</sup>

Ungkapan senada diungkapkan Ibu A'isyah, karena melihat sepak terjang Bapak Amin dalam melakukan refonnasi Ibu A'isyah tertarik untuk bergabung di PAN dengan harapan dapat mengantarkan Bapak Amin menjadi presiden. Pendiri sempat menanyakan apakah hanya karena sosok Bapak Amin yang membuat Ibu A'isyah aktif di PAN. Sekali lagi Ibu A'isyah menjawab ya, Alasan yang dikemukakan, sudah belasan tahun Indonesia mencoba keluar dari kungkungan orde baru dibawah pimpinan Bapak Soeharto, namun upaya itu tidak pernah beritasil. Tapi pada akhirnya Bapak Soeharto dapat lengser dari kursi kepresidenannya hanya karena seorang Amin Rais.<sup>57</sup>

Berbeda dengan yang diungkapkan Ibu Nurhaidah Somad (anggota Dewan wanita di Komisi E dari PAN) bahwa tujuan Ibu Nurhaidah aktif di politik karena Ibu Nurhaidah merasa terpanggil untuk mengoptimalkan peran wanita lewat jalur politik. Menrrutnya, budaya patriarkhi d Indonesia terasa sangat menghambat ruang gerak wanita di berbagai bidang, yang mengakibatkan proses marjinalisasi wanita dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hal ini menyebabkan wanita sebagai mayoritas penduduk Indonesia memiliki posisi tawar yang rendah dalam

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara bersama ibu Nadlifah Djufri, pada tanggal 26 Mei 2000, bertempat di Asrama Haji Sukolilo Surabaya

<sup>57</sup> Hasil wawancara bersama Ibu A'isyah, pada tanggal 26 Mei 2000, di Asrama Haji Sukolilo Surabaya

berbagai lini kehidupan. Melihat keadaan yang demikian Ibu Nurhaidah memutuskan untuk bergabung di PAN.<sup>58</sup>

## 8. Identifikasi Partisipasi Politik Wanita Muslim di Partai Amanat Nasional

### a. Partisipasi dalam Pemilihan Umum

Kewajiban sebagai warga negara Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah memberikan hak suara pada setiap pesta demokrasi (Pemilu) sesuai dengan ketentuan usia yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel dibawah ini diketahui partisipasi wanita muslim di PAN dalam Pemilu.

TABEL VII

Partisipasi dalam Pemilihan Umum

No	Jenis Pertanyaan	Kategori			Jumlah N% F %
		A F %	B F %	C F %	
9	Apakah responden sdalu memberikan suara dalam pemilu	8 100	- -	- -	8 100
10	Apakah pernah menghadiri atau ikut kampanye	8 100	- -	- -	8 100
11	Apakah pernah mempengaruhi orang lain untuk mencoblos	8 100	- -	- -	8 100
12	Apakah pernah membantu kontestan dalam pemilu spt.memasang tanda gambar	4 50	2 25	2 25	8 100

Keterangan    A sering/sdalu  
                       B: kadang-kadang  
                       C., tidak pernah

---

<sup>58</sup> Hasi wawancara bernama Ibu Nurhaidah Somad, pada tanggal 27 Mei 2000, di Asrama Haji Sukolilo Surabaya

Tabel VII menjelaskan bahwa 100% wanita muslim di DPW PAN sering melakukan kewajibannya sebagai warga negara untuk memberikan suaranya pada pemilu. Demikian juga keaktifan mereka dalam mengikuti kampanye sebanyak 100% menjawab sering mengikuti kampanye. Pada poin pertanyaan 11 tentang keseringan mereka mempengaruhi orang lain untuk mencoblos, wanita muslim PAN 100% menjawab sering melakukannya.

Hasil angket di atas (poin pertanyaan 10,11) didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan responden, bahwa wanita muslim yang menjadi responden penelitian ini adalah juru kampanye PAN. Jadi rata-rata mereka telah melakukan sosialisai politik di daerah-daerah menjelang pemilu. Ini menunjukkan bahwa partisipasi verbal wanita muslim di PAN termasuk partisipasi yang tinggi.

#### b. Partisipasi dalam Internal Organisasi

Kegiatan yang direncanakan partai tidak akan pernah berjalan tanpa partisipasi dari anggotanya. Wujud partisipasi itu tidak hanya kehadiran anggota saat rapat, akan tetapi partisipasi dalam mengemukakan pendapat, melakukan provokasi yang berakibat pada pembuatan keputusan organisasi, serta bantuan materiil untuk realisasi kegiatan partai menjadi ukuran partisipasi mereka di internal organisasi. Tabel berikut ini menjelaskan partisipasi wanita muslim PAN dalam internal organisasi.

TABEL VIII

#### Partisipasi dalam Internal Organisasi

No	Jenis Pertanyaan	Kategori			Jumlah N% F %
		A F %	B F %	C F %	

13	Apakah responden aktif menghadiri rapat organisasi	7 87,5 1 12,5 - -	8 100
14	Untuk jawaban ya, apakah responden pernah mengajukan usul pada rapat organisasi	6 75 2 25 - -	8 100
15	Apakah responden pernah memberikan bantuan materi pada organisasi	5 62,5 3 37,5 - -	8 100
14	Apakah responden pernah mempengaruhi anggota lain dalam pembuatan keputusan di organisasi	3 37,5 2 25 3 37,5	8 100

Keterangan A: sering

B: kadang-kadang

C: tidak pernah

Intensitas kehadiran wanita muslim pada rapat-rapat yang diselenggarakan DPW PAN Jawa Timur sebanyak 87,5% menjawab sering, hanya 12,5% yang menjawab kadang-kadang. Pada saat-saat rapat tersebut sebanyak 75% sering mengajukan usul, 25% dari responden menjawab kadang-kadang saja.

Bantuan materi sebagai wujud kepedulian mereka terhadap kelangsungan partai sebanyak 62,5% menjawab sering memberikan, sedang 37,5% menjawab kadang-kadang. Upaya mempengaruhi anggota lain dalam pembuatan keputusan di organisasi sebanyak 37,5% menyatakan sering mempengaruhi, 25% menyatakan kadang-kadang, dan 37,5% menyatakan tidak pernah.

Dari jabaran tabel tersebut menunjukkan partisipasi wanita muslim PAN dalam internal organisasi termasuk partisipasi berkesinambungan yang tinggi, karena kegiatan partai mereka tidak berhenti pada kegiatan kampanye saja. Berbeda dengan partisipasi kadangkala, yaitu aktif di partai pada saat-saat tertentu saja.

#### c. Partisipasi dalam Ioby Pemerintah atau Eksternal Organisasi

Bentuk partisipasi politik yang lain yaitu melakukan loby kepada pemerintah atau pejabat. Loby yang dimaksud yaitu loby yang menyangkut kepentingan umum dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan secara langsung yaitu melakukan loby dengan mengadakan pertemuan bersama para pejabat pemerintah, sedang secara tidak langsung bisa saja mengajukan usul atau loby melalui perantara. Seperti memberikan usul melalui wakil anggota Dewan karena kesempatan untuk dialog bersama pejabat tidak memungkinkan. Di bawah ini penjelasan dalam bentuk tabel tentang partisipasi wanita muslim PAN Jawa Timur dalam loby pemerintah atau eksternal organisasi wanita muslim PAN Jawa Timur.

TABEL IX

## Partisipasi dalam Loby Pemerintah atau Eksternal Organisasi

No	Jenis Pertanyaan	Kategori						Jumlah N% F %
		A F %	B F %	C F %	A F %	B F %	C F %	
17	Apakah responden pernah mengajukan usul pada pemerintah	4	50	2	25	2	25	8 100
18	Apakah pernah mengadakan pertemuan dengan pejabat	2	25	3	37,5	3	37,5	8 100
19	Apakah pernah mengeluarkan uang untuk memperlancar usulan kepada pemerintah	-	-	-	-	8	100	8 100
20	Apakah pernah mempengaruhi orang lain sehubungan dengan isu yang berkembang, dan dapat mempengaruhi kebijakan publik	1	12,5	2	25	5	67,5	8 100

Keterangan A: sering/selalu  
B: kadang-kadang  
C: tidak pernah

Hasil angket menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wanita muslim PAN yang sering mengajukan usul kepada pemerintah sebanyak 50%, 25% menyatakan

kadang-kadang, dan 25% lagi menyatakan tidak pernah mengajukan usul. Pertemuan dengan pejabat sebanyak 25% menyatakan sering melakukan, 37,5% menjawab kadang-kadang, dan 37% menjawab tidak pernah.

Walaupun wanita muslim PAN pernah mengajukan usul pada pemerintah, namun dalam mengemukakan usul-usul yang diajukan, wanita muslim PAN 100% menyatakan tidak pernah melakukan praktek *money politic*. Kenyataan ini menguatkan asumsi bahwa sebagai wanita muslim dan wanita yang berkecukupan, pantang bagi mereka untuk melakukan *money politic*.

Praktek mempengaruhi orang lain sehubungan dengan isu yang berkembang dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, sebanyak 12,5% menyatakan sering mempengaruhi, 25% menyatakan kadang-kadang, dan 67,5% menyatakan tidak pernah melakukan.

#### **D. Partisipasi Politik Wanita Muslim di Partai Persatuan Pembangunan**

##### **1. Gambaran Umum Wanita Muslim di Partai Persatuan Pembangunan**

Partai Persatuan Pembangunan adalah satu-satunya partai lama yang menjadi sampel penelitian ini. Wanita-wanita muslim yang bergabung di partai ini lebih beragam *background* organisasinya. Unsur Nahdlatul Ulama', Muslimin Indonesia, Serikat Islam dan Muhammadiyah mewarnai dinamika organisasi PPP.

Dari hasil observasi peneliti dapat diketahui bahwa kualitas mereka dalam politik lebih baik dari partai lainnya. Keadaan ini terjadi karena sebagian besar mereka yang berkecimpung di PPP sudah berpengalaman dalam percaturan politik baik di tingkat regional maupun nasional. Dari beberapa wanita di PPP ada yang

pernah menjadi anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur selama tiga periode, ada juga yang menjabat selama dua periode. Bahkan ada yang sempat menjadi anggota legislatif pusat (DPR RI tahun 1997) pada periode presiden Soeharto. Namun kesempatan tersebut tidak sempat dienyam lama, karena seiring dengan lengsernya Soeharto, anggota dewan wanita dari PPP ini juga harus mengakhiri jabatannya.

Kondisi wanita muslim PPP Jawa Timur saat ini tidak seperti masa orde baru. Munculnya beberapa partai di era reformasi berimbas pada penurunan jumlah sumber daya wanita muslim di PPP Jawa Timur. Kader-kader PPP wanita banyak yang nmenyeberag ke partai lain bersamaan munculnya partai-partai baru. Dengan demikian kinerja Partai Persatuan Pembangunan saat ini agak tersendat-sendat.

Sebelum era reformasi, PPP sempat mengantarkan 10 kader wanitanya untuk duduk di kursi legislatif. Akan tetapi saat ini (pemilu 1999) PPP tidak memiliki satu kader wanitapun yang duduk di DPRD Tingkat I Jawa Timur.

Tentang jumlah wanita muslim yang masuk dalam struktur kepengurusan partai tidak beda jauh dengan partai-partai sebelumnya. Mereka hanya masuk di sebagian kecil biro-biro<sup>59</sup> partai.

Wanita yang masuk dalam struktur pengurus harian PPP ada dua orang, masing-masing sebagai wakil ketua yang tugasnya mengkoordinir lembaga Wanita Persatuan dan wakil sekretaris tugasnya membantu sekretaris umum.

Di PPP ada sembilan biro yaitu biro Pemenangan Pemilu, biro Organisasi dan Keanggotaan, biro Diklat, biro Tenaga Kerja dan Perhubungan, biro Da'wah,

---

<sup>59</sup> Seperti halnya PKB, Istilah pembagian bidang garap partai di PPP menggunakan istilah biro

Hubungan antar Lembaga Pengabdian Masyarakat, biro Pemuda, Mahasiswa dan Satgas, biro Penerangan, Penerbitan dan Dokumentasi, biro Pengembangan Koperasi, Tani dan Nelayan, dan biro Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga. Selain sembilan biro tersebut masih ada tiga lembaga lagi yaitu lembaga Wanita Persatuan, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga Satgas yang berfungsi sebagai lembaga semi otonom.

Wanita-wanita yang menjadi pengurus di biro-biro tersebut masing-masing ada satu wanita yaitu; biro Pemenangan Pemilu, biro Organisasi dan Keanggotaan, dan biro Tenaga Kerja dan Perhubungan. Pada biro Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga ada tiga nama wanita yang masuk sebagai anggota pengurus. Sedang di biro Da'wah, Hubungan antar Lembaga Pengabdian Masyarakat, biro Pemuda, Mahasiswa, dan Satgas, biro Penerangan, Penerbitan dan Dokumentasi, dan biro Pengembangan Koperasi. Tani dan Nelayan, tidak ada satupun nama wanita yang masuk dalam daftar pengurus.

Sementara pada lembaga semi otonomnya, otomatis sebagian besar wanita masuk dalam kepengurusan Lembaga Wanita Persatuan.

Kegiatan rutin Wanita Persatuan yang terealisasi yaitu arisan bulanan, pengajian yasinan, sillaturahmi antar anggota WP, dan beberapa kegiatan insidental seperti seminar dan lokakarya. Namun secara umum, kegiatan WP ini diarahkan untuk peningkatan peranan wanita dalam pembangunan, peningkatan potensi wanita dalam perjuangan partai, dan peningkatan hubungan dengan ormas-ormas wanita.

## 2. Usia Wanita Muslim di Partai Persatuan Pembangunan



Karena yang terlibat dalam kepengurusan partai ini sebagian besar adalah kader lama, maka usia mereka rata-rata di atas 40 tahun. Untuk lebih jelas mengetahui usia wanita muslim yang aktif di PPP, lihat tabel berikut:

TABEL I

## Umur Responden

No	Jenis Pertanyaan	Umur Responden				Jumlah N%
		25-35 F %	36-45 F %	46-55 F %	56-65 F %	F %
1	Berapakah umur responden	1 12.5	1 12,5	6 75	-	8 100

Dari label tersebut diketahui bahwa wanita-wanita muslim yang aktif di PPP mayoritas berusia 46-55 tahun dengan jumlah prosentase sebanyak 75% Sedang yang berusia 25-35 dan 36-45 masing-masing 12,5%.

## 3. Status Perkawinan Wanita Muslim di Partai Persatuan Pembangunan

Status perkawinan wanita muslim di PPP sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

TABEL II

## Status Perkawinan Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kawin F %	Janda F %	Tidak Kawin F %	Jumlah N%
		F %	F %	F %	F %
2	Status perkawinan responden	6 75	2	25	8 100

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wanita dengan status kawin sebanyak 75%, dan 25% janda.

#### 4. Tingkat Pendidikan Wanita Muslim di Partai Persatuan Pembangunan

Sesuai dengan hasil angket yang telah peneliti sebarakan pada responden, maka jawaban pertanyaan tentang pendidikan formal terakhir wanita di PPP adalah:

TABEL III

##### Tingkat Pendidikan Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kategori				Jumlah N% F %
		A	B	C	D	
		F %	F %	F %	F %	
3	Apakah pendidikan formal terakhir responden	2	5	62,5	12,5	8 100

Keterangan A: SLTP  
B: SLTA  
C: Perguruan Tinggi  
D: Lain-lain

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan formal terakhir yang sempat dikenyam wanita muslim di PPP, sebanyak 25% pendidikan terakhirnya sampai jenjang SLTA 62,5% tamatan dari Perguruan Tinggi, dan 12,5% menjawab lain-lain. Keadan latar belakang pendidikan wanita muslim tidak jauh beda dengan wanita muslim di PKB, PBB. dan PAN, yaitu sebagian besar mereka lulusan perguruan tinggi.

#### 5. Pekerjaan Wanita Muslim di Partai Persatuan Pembangunan

Untuk mengetahui bekerja atau tidaknya serta jenis pekerjaan politisi wanita muslim di PPP, perhatikan tabel berikut:

TABEL IV

##### Pekerjaan Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kategori						Jumlah N% F %							
		A	B	C	D	E	F								
		F %	F %	F %	F %	F %	F %								
1	Apakah pekerjaan responden sekarang	1	12,5	-	-	1	12,5	2	25	-	-	4	50	8	100

Keterangan A: Tidak bekerja  
 B: Pegawai Negeri  
 C: Wiraswasta  
 D: Pegawai Swasta  
 E: Pedagang  
 F: Lain-lain

Menjawab pertanyaan di atas, sebanyak 12,5% wanita muslim menyatakan tidak bekerja, 25% berwiraswasta, bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 25%, dan 50% menjawab lain-lain.

#### 6. Status Ekonomi Wanita Muslim cfi Partai Persatuan Pembangunan

Kondisi ekonomi sangat berpengaruh pada aktifitas berorganisasi. Bila keadaan ekonomi sangat pas-pasan maka tingkat keaktifan mengikuti kegiatan organisasi akan berbeda dengan mereka yang tingkat ekonominya lebih mapan. Tabel berikut menjelaskan status ekonomi wanita muslim di PPP.

TABEL V

#### Tingkat Ekonomi Responden

No	Jenis Pertanyaan	Kategori				Jumlah N% F %				
		A F %	B F %	C F %	D F %					
5	Berapakah pendapatan keluarga responden secara keseluruhan dalam waktu sehari	4	50	3	37,5	1	12,5	8	100	
6	Berapakah jumlah tanggungan keluarga	4	50	4	50	-	-	-	8	100
7	Bagaimana status rumah responden	7	87.5	1	12,5	-	-	-	8	100

- Keterangan soal no. 5.      A: Rp. 10.000-Rp. 30.000  
    B: Rp. 30.000-Rp. 40.000  
    C: Rp. 40.000-Rp. 50.000  
    D: di atas Rp.50.000
- Keterangan soal no.6.      A: di atas empat orang  
    B: antara 1-2 orang  
    C: antara 3-4 orang  
    D: tidak memiliki tanggungan
- Keterangan soal no.7.      A: milik sendiri  
    B: kontrak  
    C: warisan orang tua  
    D: menumpang/ngenger

Dari beberapa poin pertanyaan yang terkait dengan status ekonomi wanita muslim di PPP, diperoleh gambaran 50% berpenghasilan antara Rp.10.000-Rp. Rp.30.000 setiap harinya, 37,5% berpenghasilan Rp.40.000-Rp.50.000, dan 12,5% berpenghasilan diatas Rp.50.000.

Jumlah tanggungan keluarga responden di atas empat orang sebanyak 50%, dan yang memiliki tanggungan keluarga antara 1-2 orang 50%. Tentang status kepemilikan rumah, 87,5% menjawab status rumah mereka milik sendiri, dan 12,5% statusnya warisan dari orang tua

TABEL VI

## Indeks Pemilikan Barang Berharga

No.	Punya		Tidak Punya	
	F	%	F	%
8. Nama Barang				
Mobil	6	75	2	25
Sepeda Motor	7	87,5	1	12,5
Televisi	8	100	-	-
Computer	6	75	2	25
Recorder	8	100	-	-
Radio	7	87,5	1	-

Daftar barang berharga yang dimiliki wanita muslim di PPP berdasarkan tabel di atas, 75% wanita muslim memiliki mobil, 25% tidak punya mobil, yang memiliki sepeda motor sebanyak 87,5%, sedang yang 12,5% tidak punya, tape recorder dan televisi 100% responden memilikinya, sedang computer sebanyak 75% memilikinya, yang 12,5% tidak punya.

Meskipun berdasarkan penghasilan mereka rata-rata yang paling banyak hanya berkisar Rp. 10.000 - Rp. 30.000, namun berdasarkan hasil angket daftar pemilikan barang, mayoritas wanita muslim PPP memiliki mobil, sepeda motor, computer, televisi, tape recorder, dan radio.

#### 7. Tujuan Partisipasi Politik Wanita Muslim di Partai Persatuan Pembangunan

Semula Ibu Muniroh Munir tidak berniat masuk dalam dunia politik, demikian Ibu Muniroh mengawali cerita perjalanan karir politiknya. Ibu Muniroh awal mulanya hanya berprofesi sebagai juru kampanye yang mendapat gaji setiap selesai kampanye. Dia tidak mau terikat dengan satu organisasi politik yang menurutnya sangat mengganggu dirinya sebagai seorang da'iyah. Namun setelah berselang lama, dan akhirnya memahami PPP Ibu Muniroh memutuskan untuk benar-benar terlibat di partai. Keputusan ini akhirnya diambil Ibu Muniroh karena dengan masuk di PPP menurutnya, ia juga bisa berda'wah. Seiring dengan kejayaan PPP di masa orde baru, Ibu Muniroh pernah duduk di kursi legislatif selama dua periode. Namun bukan berarti duduk di kursi legislatif menjadi tujuan utamanya, karena sebagai anggota dewan amanat yang diembannya semakin berat. Ibu

Muniroh harus bisa mewarnai keadaan lembaga DPRD dengan misi Islam yang diamanatkan masyarakat kepadanya.<sup>60</sup>

Berbeda dengan Ibu Muniroh, Ibu A'isyah terlibat di PPP karena suaminya salah satu aktivis partai dan saat ini duduk di kursi legislatif. Jadi awalnya Ibu A'isyah tidak begitu tertarik dengan politik.<sup>61</sup>

Ibu Rasmida memberikan jawaban lain lagi, karena sejak kecil Ibu Rasmida sudah aktif di organisasi (saat ini Ibu Rasmida juga aktif di A'isyiyah PDA Pandaan), maka pada saat gaung PPP berkibar Ibu Rasmida merasa tertarik bergabung di PPP. Karena pada waktu itu (sekitar tahun 1969-an) partai Islam yang benar-benar memperjuangkan misi Islam hanya PPP. Sejak saat itu Ibu Rasmida menjadi aktivis partai PPP. Beliau juga pernah duduk di kursi legislatif selama tiga periode.<sup>62</sup>

## 8. Identifikasi Partisipasi Politik Wanita Muslim di PPP

### a. Partisipasi dalam Pemilihan Umum

Ada empat poin pertanyaan yang peneliti ajukan untuk mengetahui partisipasi wanita muslim dalam Pemilihan Umum. Daftar pertanyaan beserta hasilnya tersaji dalam tabel berikut.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Muniroh, pada tanggal 19 Mei 2000, bertempat di kediamannya Wisma Penjaringan Asri.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu A'isyah, pada tanggal 29 Mei 2000, bertempat di rumahnya Gang Lebar Wonocolo.

<sup>62</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Rasmida, pada tanggal 5 Juni 2000, bertempat di Kantor DPW PPP Jawa Timur.

TABEL VII

## Partisipasi dalam Pemilihan Umum

No	Jenis Pertanyaan	Kategori				Jumlah N% F %
		A F %	B F %	C F %	D F %	
9	Apakah responden selalu memberikan suara dalam pemilu	8 100	- - -	- - -	- - -	8 100
10	Apakah pernah menghadiri atau ikut kampanye	8 100	- - -	- - -	- - -	8 100
11	Apakah pernah mempengaruhi orang lain untuk mencoblos	8 100	- - -	- - -	- - -	8 100
12	Apakah pernah membantu kontestan dalam pemilu seperti memasang tanda gambar	2 25	2 25	4 50		8 100

Keterangan A: sering/selalu  
 B: kadang-kadang  
 C: tidak pernah

Hasil angket menunjukkan bahwa partisipasi wanita di PPP sering memberikan suara dalam Pemilu sebanyak 100%, yang sering ikut kampanye 100%, yang mempengaruhi orang lain untuk mencoblos 100% menyatakan sering, dan yang membantu memasang atribut partai menjelang Pemilu 25% menyatakan sering 25% menyatakan kadang-kadang, dan 50% menyatakan tidak pernah.

Data angket tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti bersama responden tentang partisipasi mereka dalam pemilihan umum benar-benar intens mereka lakukan. Seperti kampanye, mereka sudah cukup lama malang melintang menjadi juru kampanye partai. Bahkan seperti yang dilakukan Ibu Muniroh, telah menjadi juru kampanye partai sejak tahun 1974.

Kondisi partisipasi dalam pemilu wanita muslim di PPP sebagaimana yang tergambar di atas cukup wajar, karena rata-rata wanita muslim PPP sudah lama terjun di dunia politik.

b. Partisipasi dalam Internal Organisasi

Mengukur partisipasi politik wanita muslim PPP dalam internal organisasi dapat diketahui melalui tabel berikut:

TABEL VIII

Partisipasi dalam Internal Organisasi

No	Jenis Pertanyaan	Kategori			Jumlah N%
		A F %	B F %	C F %	
13 14	Apakah responden aktif menghadiri rapat organisasi	6 75	2 25	- - -	8 100
	Untuk jawaban ya, apakah responden pernah mengajukan usul pada rapat organisasi	6 75	2 25	- - -	8 100
15	Apakah responden pernah memberikan bantuan materi pada organisasi	5 62,5	3 37,5	- -	8 100
14	Apakah responden pernah mempengaruhi anggota lain dalam pembuatan keputusan di organisasi	3 37,5	3 37,5	3 37,5	8 100

Keterangan A: sering  
B: kadang-kadang  
C: tidak pernah

Partisipasi wanita muslim di PPP dalam menghadiri rapat organisasi, 75% menyatakan sering hadir. 25% menyatakan kadang-kadang. Pada saat rapat, sebanyak 75% responden menyatakan sering mengajukan usul, 25% kadang-kadang.



Memberikan bantuan materi kepada organisasi, sebanyak 62,5% menyatakan sering membelikan bantuan, 37,5% menyatakan kadang-kadang. Kegiatan mempengaruhi anggota lain dalam pembuatan keputusan di organisasi, sebanyak 37,5% responden menyatakan sering melakukan, kadang-kadang mempengaruhi sebanyak 37,5%, dan 25% menyatakan tidak pernah.

c. Partisipasi dalam Lobby Pemerintah atau Eksternal Organisasi

Partisipasi dalam melakukan loby pemerintah atau dengan eksternal organisasi yang dilakukan wanita muslim di PPP, terjabar dalam tabel berikut.

TABEL IX

Partisipasi dalam Lob)' Pemerintah atau Eksternal Organisasi

No	Jenis Pertanyaan	Kategori A B C			Jumlah N% F %
		F %	F %	F %	
17	Apakah responden pernah mengajukan usul pada pemerintah	4 50	2 25	2 25	8 100
18	Apakah pernah mengadakan pertemuan dengan pejabat	4 50	3 37,5	1 12,5	8 100
19	Apakah pernah mengeluarkan uang untuk memperlancar usulan kepada pemerintah	-	-	8 100	8 100
20	Apakah pernah mempengaruhi orang lain sdiubungan dengan isu yang berkembang, dan dapat mempengaruhi kebijakan publik	1 12,5	2 25	5 67,5	8 100

Keterangan A: sering/selalu  
B: kadang-kadang  
C: tidak pernah

Partisipasi wanita muslim di PPP dalam melakukan loby pemerintah atau eksternal organisasi menurut hasil angket diketahui bahwa 50% responden sering mengajukan usul pada pemerintah, 25% kadang-kadang, dan 25% menyatakan

tidak pernah. Melakukan pertemuan dengan pejabat sebanyak 50% responden menyatakan sering 37,5% menyatakan kadang-kadang, dan 12,5% menyatakan tidak pernah.

Dalam mengajukan usul kepada pejabat/pemerintah, sebanyak 100% responden menyatakan tidak pernah melakukan praktek *money politic* untuk *me-landing*-kan usulan-usulan tersebut. Tentang tingkat keseringan responden dalam mempengaruhi orang lain sehubungan dengan isu yang berkembang dan dapat mempengaruhi kebijakan politik, sebanyak 12, 5% menyatakan sering, 25% menyatakan kadang- kadang, dai 62,5% menyatakan tidak pernah.

Bentuk dari partisipasi wanita muslim di eksternal organisasi yaitu mengajukan usulan-usulan kepada pemerintah. Usulan-usulan yang pernah dilakukan oleh wanita muslim diantaranya, mengajukan usul tentang perubahan sistem pendidikan di sekolah dasar yang pada awalnya tidak ada porsi pendidikan agama, pemberdayaan wanita di bidang hukum dan lainnya, saat ini porsi-porsi tersebut sedikit banyak telah terealisasi.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Pada tahap analisis data tentang partisipasi politik wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP, tidak dianalisis secara terpisah antar partai. Namun pada analisis penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisis secara terpadu kondisi partisipasi politik wanita di partai-partai tersebut. Maksud peneliti, agar analisis komparatif tentang partisipasi politik wanita muslim di Surabaya ditemukan secara kongkrit pada bab ini.

#### **A. Analisis tentang Kondisi Umum Wanita Muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP.**

Melihat paparan data pada bab III, diperoleh gambaran bahwa secara umum jumlah wanita muslim yang terakomodir di kepengurusan di PKB, PBB, PAN, dan PPP masih sangat jauh di bawah standar kapasitas jumlah wanita sebagai konstituen terbesar. Kondisi semacam ini menimbulkan beberapa analisis kemungkinan, kemungkinan pertama, karena minimnya jumlah wanita muslim di Surabaya yang tertarik dengan dunia publik, kedua, karena sengaja diciptakan oleh laki-laki yang merasa lebih superior dan berkualitas dibanding wanita, dan ketiga, adanya pemahaman keagamaan baik laki-laki maupun wanita tentang keterlibatan wanita dalam politik adalah sesuatu yang tidak dimungkinkan.

Kemungkinan-kemungkinan di atas, menurut peneliti keseluruhannya mendekati kebenaran, kemungkinan pertama misalnya, hal ini berdasarkan kondisi umum wanita di Surabaya bahkan seluruh Indonesia, wanita yang tidak tertarik

dengan dunia publik relatif banyak. Sebagian alasan yang mengemuka, karena kesibukan wanita di sektor domestik sangat menyita perhatian wanita sehingga wanita-wanita muslim tidak sempat melihat kondisi di luar dunia domestiknya. Menurut peneliti juga, wanita-wanita yang aktif di organisasi tidak bisa dipaksakan, karena unsur talenta juga mendukung wanita untuk aktif berorganisasi. Ungkapan ini didukung hasil wawancara peneliti dengan beberapa wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP, bahwa sebagian besar mereka yang aktif di parpol adalah aktivis-aktivis organisasi-organisasi kemasyarakatan sejak lama. Ini artinya, keinginan untuk terjun di politik tidak serta merta pada saat musim partai politik tiba, akan tetapi mereka telah lama aktif berorganisasi.

Kemungkinan kedua, tentang superioritas laki-laki, masih tumbuh subur di kalangan sikap laki-laki. Sikap ini bukan hanya terjadi di partai politik, akan tetapi sikap ini sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia di setiap institusi organisasi. Wanita dinomorduakan dalam setiap kebijakan dan peran adalah hal biasa. Umumnya mereka menganggap kapasitas intelektual wanita sangat minim, sehingga wanita tidak layak untuk masuk dalam wilayah-wilayah yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan berkualitas. Kalaupun ada wanita yang masuk dalam struktur kepengurusau organisasi, semata-mata bukan karena kemampuannya akan tetapi 'sekedar ada wanitanya. Peneliti melihat sikap ini juga terjadi di parpol Surabaya. Sebenarnya kalau ingin melibatkan wanita yang berkualitas mereka tidak akan kesulitan mencarinya. Banyak sekali sumberdaya-sumberdaya wanita yang berkualitas yang bisa dilibatkan di parpol. Akan tetapi

karena sikap superior dan *under estimate* laki-laki terhadap wanita menghalangi wanita untuk dapat aktif di parpol.

Kemungkinan ketiga, tentang sikap pemahaman keagamaan baik laki-laki maupun wanita tentang kiprah wanita di dunia politik yang belum membaik, sangat dominan di kalangan masyarakat Indonesia dan Islam khususnya. Pemahaman ini sudah mengakar dengan mengambil ayat-ayat suci yang dijadikan justifikasi sebagai pembenar sikap mereka yang mengharamkan wanita untuk aktif di publik bahkan menjadi pimpinan. Keadaan semacam ini bisa jadi terjadi di parpol Surabaya. Minimnya wanita muslim yang aktif di parpol karena umumnya pemahaman keagamaan wanita dan laki-laki muslim di Surabaya tentang tafsir peran dan fungsi mereka sendiri masih sangat terbatas.

## **B. Analisis tentang Usia Wanita Muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP**

Kesadaran berpolitik salah satunya ditandai dengan kematangan usia seseorang. Dari paparan data yang peneliti peroleh diketahui bahwa usia wanita muslim yang aktif di PKB mayoritas berusia 36-45 tahun (50%), di PBB jumlah wanita yang berusia 25-35 tahun lebih besar yaitu sebanyak 50%, di PAN usia wanita 36-45 tahun relatif lebih banyak (37.5%), dan di PPP sebagian besar mereka sudah berusia 46-55 tahun (75%).

Dari deskripsi tersebut merupakan satu temuan yang menarik mengapa terjadi perbedaan usia pada kalangan wanita muslim dalam memilih partai politik. Di PBB misalnya, kalangan muda yang justru mendominasi jumlah wanita muslim yang terlibat di PBB. Asumsi peneliti, karena PBB adalah partai baru yang tidak memiliki

basis massa yang jelas, sehingga pola rekrutmen di PBB lebih mudah menjangkit kalangan muda. Kondisi ini terjadi karena antara PBB dan PAN sebagian besar massanya dari Muhammadiyah, sementara sebagian besar (wanita dewasa yang berusia antara 36-45 tahun) wanita muslim Muhammadiyah banyak yang aktif di PAN. Maka yang terjadi kemudian jumlah wanita muda yang bergabung di PBB yang berusia antara 25-35 tahun lebih besar dari usia di atasnya.

Sedang wanita muslim di PKB lebih banyak yang berusia 36-45 tahun karena basis massa PKB lebih jelas, sehingga pola rekrutmen yang digunakan lebih mudah. Maksud peneliti, jumlah wanita muslim yang bergabung di PKB sebagian besar adalah aktivis organisasi *underbouw* NU, dari rata-rata mereka sudah berpengalaman dalam organisasi kemasyarakatan cukup lama sehingga perekrutan fungsionaris wanita muslim di PKB Jawa Timur dijangkit melalui onnas-onnas NU tersebut (Fatayat, Muslimat, dan IPPNU). Dan seperti pengamatan peneliti, jumlah wanita di PKB dari unsur Muslimat, organisasi kemasyarakatan yang dimiliki NU bagi kaum ibu NU.

Berbeda dengan PPP, wanita muslim yang bergabung di partai ini didominasi wanita dewasa yang berusia antara 45-55 tahun. Keadaan ini tidak lain karena faktor usia dari PPP itu sendiri yang relatif sudah tua. Sehingga wanita-wanita muslim yang bergabung di PPP adalah wanita-wanita muslim yang benar-benar sudah terkader di PPP sejak lama, dan rata-rata mereka sudah berpengalaman di partai politik.

### **C. Analisis tentang Status Perkawinan Wanita Muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP**

Status perkawinan wanita muslim tiga partai dari empat partai diketahui bahwa mayoritas mereka statusnya sudah kawin. Satu partai yaitu PBB, status perkawinan antara yang sudah kawin dan yang belum kawin seimbang, yaitu sebanyak 50%. Merujuk pada usia wanita muslim yang bergabung di PBB, sebagian besar mereka masih berusia 25-35 tahun, maka kondisi ini sangat bertalian. Namun yang perlu dicatat bahwa *sense of politics* wanita tidak ditentukan oleh status perkawinan mereka, akan tetapi faktor determinan bergantung pada kemauan, kemampuan, dan kesempatan politik. Kondisi inilah yang sedang terjadi di PBB.

Jumlah mayoritas wanita muslim yang sudah menikah di partai-partai tersebut juga mengindikasikan bahwa meskipun mereka sibuk dengan urusan rumah tangga tetapi tidak menghalangi mereka untuk terlibat aktif di parpol.

### **D. Analisis tentang Tingkat Pendidikan Wanita Muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP**

Untuk membuktikan ungkapan Lipset bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya, terbukti pada penelitian ini dari jumlah empat partai politik tersebut, mayoritas mereka lulusan dari Perguruan Tinggi. PKB sebanyak 50%, PBB 75%, PAN 52.5%, dan PPP sebanyak 52,5%. Keterlibatan wanita lulusan Perguruan Tinggi di kancah politik menunjukkan tingkat kesadaran berpolitik mereka yang sudah membaik.

### **E. Analisis tentang Jenis Pekerjaan Wanita Muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP**

Di samping aktif berorganisasi, ternyata wanita-wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP juga bekerja. Seperti halnya di PKB, sebanyak 37,5% bekerja sebagai wiraswastawati. 37,5% pegawai swasta, dan sebagian kecil lainnya (25%) menjawab lain-lain, tetapi mereka tidak mengungkapkan dengan jelas jenis pekerjaannya. Kaum ibu pada umumnya tidak suka menyebut jenis pekerjaan mereka yang tidak bersifat formal, seperti penjahit, laundry, dan sejenisnya.

Wanita muslim di PBB sebanyak 37,5% wiraswasta, 37,5% menjawab lain-lain, 12,5% menganggur, dan 12,5% pegawai swasta. Sedangkan wanita di PAN sebagian besar dari mereka berwiraswasta (62,5%), 12,5% pedagang, dan 25% tidak bekerja. Terakhir, jenis pekerjaan wanita muslim di PPP, sebanyak 50% menjawab lain-lain, 12,5% tidak bekerja, pegawai swasta 25%, dan 12,5% berwiraswasta.

Jadi sebagian besar dari responden adalah orang-orang yang cukup sibuk, karena di samping mereka aktivis politik, mereka adalah wanita-wanita yang bekerja dan ibu rumah tangga. Dapat diasumsikan bahwa kesibukan tidak menghalangi mereka untuk aktif berpolitik.

#### **F. Analisis» tentang Tingkat Ekonomi Wanita Muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP**

Tingkat ekonomi wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP dapat diukur dengan indikator besarnya penghasilan dalam waktu tertentu, besarnya jumlah tanggungan, status rumah yang didiami, dari indeks pemilikan barang berharga yang dimiliki. Dari beberapa indikator ini diketahui tingkat penghasilan wanita



muslim di PKB dalam sehari rata-rata di atas Rp. 50.000 menempati prosentase yang terbesar. Demikian juga dengan wanita muslim di PAN, penghasilan mereka rata-rata dalam sehari mayoritas Rp. 50.000 ke atas. Sementara wanita muslim di PBB dan PPP, sebagian besar rata-rata penghasilan mereka antara Rp. 10.000 - Rp. 30.000 dengan jumlah prosentase 50%.

Dari jumlah penghasilan yang tertera di atas, mereka bukanlah wanita-wanita yang hidup berkekurangan dan terlalu berlebihan. Meskipun ada yang berpenghasilan Rp. 10.000 dalam seharinya, tetapi mereka merupakan responden yang tetap dapat aktif bekerja untuk organisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki *sense of politics* yang kuat.

Jumlah tanggungan keluarga juga menjadi ukuran tingkat ekonomi wanita muslim di parpol. Gambaran yang diperoleh dari penyajian data adalah jumlah tanggungan keluarga wanita muslim di PKB sebanyak 37,5% tidak memiliki tanggungan di PKB, kondisi ini juga sama dengan wanita muslim di PBB. Sementara di PAN hanya 12,5%, dan wanita di PPP seluruhnya memiliki tanggungan. Jumlah yang memiliki tanggungan di atas 4 orang di PKB 37,5%, PBB 25% PAN 12,5% dan PPP 50%. Jumlah yang memiliki tanggungan 1-2 orang sebanyak di PKB sebanyak 25%, PBB 12,5% PAN 37,5%, dan PPP 50%. Sedang yang memiliki tanggungan antara 3-4 orang hanya wanita muslim di PBB sebanyak 25%, dan wanita muslim di PAN sebanyak 37,5%. Ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya (pekerjaan dan jumlah penghasilan) bahwa mereka bekerja dan mendapatkan penghasilan bukan untuk kebutuhan pribadi akan tetapi mereka rata-rata memiliki beban untuk kebutuhan keluarga.

Sedang status rumah yang mereka tempati rata-rata statusnya rumah milik sendiri. Ini tercatat PKB sebanyak 62,5%, PBB 50%, PAN 87,5% dan PPP 87,5%. Ada sebagian kecil juga yang masih menumpang di rumah orang tua PKB 25%, PBB 37,5% dan PAN 12,5% Status rumahnya yang masih kontrak ada 12,5% dari PKB, dan status rumahnya warisan ada 12,5% dari PPP. Melihat keadaan ini dapat dipastikan bahwa rata-rata keadaan ekonomi responden (dari PKB, PBB, PAN, dan PPP) dilihat dari status kepemilikan rumahnya tergolong wanita-wanita yang berkecukupan.

Pernyataan tersebut didukung pula dengan indeks pemilikan barang berharga di antaranya: mobil, dari PKB ada 62,5% yang memilikinya, PBB 25% PAN 75%, dan PPP 75%. Responden dari PKB yang memiliki sepeda motor 75%, PBB 100%, PAN 62,5% PPP 87,5%. Barang berharga televisi, radio, dan tape recorder 100% dari seluruh unsur partai memilikinya. Sedang computer dari PKB hanya 25% yang punya, PBB 12,5%, PAN 75%, dan PPP 75%. Ini menunjukkan bahwa wanita-wanita muslim yang saat ini berkecimpung di dunia politik bukan wanita-wanita yang berorganisasi tanpa modal, akan tetapi keadaan ekonomi mereka tergolong lumayan. Ini sekaligus menepis anggapan-anggapan negatif yang terkadang muncul di permukaan, bahwa keikutsertaan wanita dalam organisasi politik hanya sebagai batu loncatan untuk meraih kursi legislatif yang menjanjikan banyak materi.

#### **G. Analisis tentang Tujuan Partisipasi Politik Wanita Muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP**

Tujuan partisipasi politik wanita muslim di PKB dapat dikelompokkan menjadi tiga; yaitu pertama, karena kesadaran posisi yang terpinggirkan dari laki-

laki nemicu mereka untuk memberdayakan wanita lewat segmen politik dan ingin membuktikan bahwa wanita juga mampu dalam politik. Kedua, keinginan wanita muslim di PKB untuk menanamkan pemahaman keagamaan yang proporsional tentang status wanita dalam politik Ketiga, keterlibatan yang tidak direncanakan. Maksudnya, ada sebagian kecil wanita muslim di PKB yang aktif bukan karena kesadaran pribadi, semata karena lingkungan yang mendorong untuk berkiprah dalam politik.

Semangat menjalankan syi'ar Islam lebih menjadi prioritas utama tujuan sebagian wanita muslim di PBB. Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan wanita muslim di PKB, wanita muslim di PBB juga ingin meningkatkan harkat dan martabat wanita melalui politik karena Islam tidak melarang wanita untuk berpolitik. Ada juga sebagian wanita muslim di PBB yang terlibat di politik bukan atas kemauan sendiri, akan tetapi karena keadaan yang memaksa untuk aktif di parpol. Sedangkan sebagian lainnya karena ketertarikannya dengan program di PBB yang bernuansa islami.

Tujuan partisipasi politik wanita muslim di PAN dapat dikelompokkan menjadi tiga, pertama, karena rasa simpati terhadap sosok reformis (Amin Rais), kedua, karena terpanggil untuk mengoptimalkan peran wanita dengan mendobrak budaya patriarkhi yang telah menghambat ruang gerak wanita di berbagai lini kehidupan Ketiga, karena ingjn membuktikan kepada publik bahwa wanita juga memiliki potensi dan sumberdaya yang berkualitas untuk dapat berdampingan dengan laki-laki di berbagai sektor kehidupan.

Sedangkan tujuan partisipasi politik wanita muslim di PPP diantaranya, karena keinginan wanita muslim PPP untuk dapat mengekspresikan kemampuannya lewat politik. Ada juga yang ingin melanjutkan misi da'wah yang pernah digelutinya sebelum terjun di partai politik. Sebagian lainnya ada yang terlibat politik karena keadaan yang memaksanya untuk terlibat di politik.

Melihat beberapa tujuan partisipasi politik wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP menunjukkan bahwa sebenarnya keterlibatan-keterlibatan wanita-wanita muslim tersebut pada intinya bertujuan sama. Yaitu, ingin memaksimalkan peran wanita untuk dapat berkembang dan meninggalkan kualitas peran wanita melalui jalur politik. Hanya saja wadah ekspresi mereka dalam mewujudkan keinginan tersebut berbeda-beda. Ada yang lewat PKB karena basis organisasi mereka dari NU, ada yang melalui PBB karena keinginan untuk meneruskan perjuangan Masyumi yang telah ada sebelumnya, melalui PAN karena basis organisasi mereka dari kalangan Muhammadiyah, dan memilih PPP karena partai ini telah digeluti sejak lama sebelum lahirnya partai-partai baru.

Meskipun demikian ada juga perbedaan tujuan partisipasi politik wanita muslim di PAN dengan partai lainnya, yaitu ketertarikan beberapa wanita muslim bergabung di PAN karena alasan kharisma tokoh yang dianggap sebagai figur sentral yang patut dibanggakan dan diperjuangkan. Sikap semacam ini tidak sepenuhnya patut disalahkan, karena dasar tersebut bisa jadi muncul oleh sebab rasa terima kasih mereka yang mendalam terhadap sosok reformis Amin Rais yang telah berjasa bagi perubahan sistem demokrasi di Indonesia. Dan pada saat Amin Rais mendeklarasikan PAN sekaligus Ketua Umum DPP PAN, wanita muslim di PAN

merasa tertarik dengan PAN. Namun sikap ini juga menunjukkan bahwa beberapa wanita muslim di PAN masih menanamkan sikap fanatisme tokoh yang semestinya tidak perlu. Sikap semacam ini bisa jadi bumerang bagi pengagum tokoh, bila suatu saat nanti sang idola terperosok dalam permainan politik. Tujuan berpartisipasi dalam organisasi apapun sebaiknya didasarkan pada profesionalisme organisasi serta visi dan misi yang diemban oleh organisasi.

Demikian juga ada perbedaan tujuan partisipasi wanita muslim di PBB, sebagian mereka terpanggil di PBB karena PBB sebagai partai Islam yang tidak sekuler. Sehingga wanita muslim di PBB menunjukkan sikap primordialismenya dengan menganggap partai lain sebagai partai non Islam, yang tidak semestinya dipilih oleh masyarakat Islam.

Yang patut dicatat dari beberapa tujuan di atas, bahwa wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP. mereka aktif di parpol tidak ada yang didasari oleh keinginan berkuasa dan menjadi anggota legislatif atau lembaga pengambilan keputusan lainnya. Tujuan mereka ingin mensejajarkan pria dan wanita dalam politik yang selama ini mengalami kendala kultural yang terkait dengan budaya patriarki dalam masyarakat yang menetapkan pola dan peran sosial yang berbeda untuk laki-laki dan wanita. Juga diperkuat oleh suatu persepsi yang salah tentang pengertian politik sebagai sesuatu yang buruk, kotor, penuh kelicikan, kekerasan, dan intimidasi, yang tidak memungkinkan wanita masuk di dalamnya karena wanita makhluk yang lemah. Alasan-alasan ini yang menjadi koridor tujuan keterlibatan mereka di partai politik.

## **H. Analisis tentang Partisipasi Politik Wanita Muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP**

### **1. Partisipasi dalam Pemilihan Umum**

Sebagaimana telah diketahui dalam penyajian data tentang partisipasi politik wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP, partisipasi dalam pemilihan umum termasuk salah satu alat ukur untuk mengetahui partisipasi politik wanita muslim. Partisipasi dalam pemilihan umum ini menyangkut beberapa aspek diantaranya: pemberian suara dalam Pemilu, ikut serta dalam kampanye, mempengaruhi orang lain untuk mencoblos, dan membantu memasang atribut partai menjelang Pemilu.

Pemilihan Umum sebagai sarana masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpin bangsa telah diatur dalam undang-undang tentang siapa saja yang memiliki hak suara dan bagaimana keadaannya. Dari paparan data tentang usia wanita-wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP menunjukkan bahwa rata-rata usia mereka adalah usia wajib membelikan suara dalam pemilu. Hasil yang diperoleh 100% dari PKB menyatakan sering memberikan hak suara, PBB 87,5%, PAN 100% dan PPP 100%. Ini menunjukkan kesadaran wanita muslim sebagai warga negara cukup baik. Sementara dari PBB ada 12,5% yang menjawab kadang-kadang ini dimungkinkan usia responden tersebut masih relatif muda, jadi baru beberapa kali responden tersebut memiliki hak wajib mencoblos dalam Pemilu.

Keikutsertaan wanita muslim dalam kampanye Pemilu diperoleh gambaran dari PKB 75% menyatakan sering, PBB 50%, PAN 100%, PPP 100%. Partisipasi dalam kampanye pada wanita muslim di empat partai tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wanita muslim di PAN dan PPP relatif lebih baik dari PKB dan PBB. Mengingat fungsionaris di PBB lebih dominan yang berusia muda dan

sebagian kecil di PKB juga demikian, maka jawaban sebagian mereka yang menyatakan kadang-kadang bahkan ada 12,5% dari PBB yang menyatakan tidak pernah adalah karena faktor usia keterlibatan mereka di partai yang belum lama. Jadi, tingkat partisipasi wanita muslim di PAN dan PPP yang lebih baik dari PKB dan PBB adalah sebuah kewajaran karena rata-rata usia mereka yang bergabung di PAN dan PPP adalah wanita-wanita yang telah memiliki hak suara lebih lama.

Kewajiban yang paling nyata bagi wanita yang terjun di dunia politik adalah melakukan provokasi terhadap warga masyarakat untuk mencoblos partai yang pilihannya, karena ia memiliki tanggung jawab untuk memenangkan partainya. Meskipun tidak harus menjadi juru kampanye formal, mempengaruhi orang lain untuk mencoblos dapat dilakukan secara informal maupun non formal, misalnya ketika bertemu di jalan, di pasar ataupun tempat-tempat lainnya yang kebetulan tidak menjadi ajang kampanye.

Kegiatan mempengaruhi orang lain untuk mencoblos ini, untuk wanita muslim di PKB menyatakan sering melakukan sebanyak 75%, dan PBB 75%. Sementara wanita muslim di PAN dan PPP 100% menyatakan sering melakukan. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wanita muslim di PAN dan PPP dalam mempengaruhi orang lain untuk mencoblos lebih baik dari PKB dan PPP. Meskipun demikian jumlah prosentase di atas menunjukkan mayoritas wanita-wanita muslim baik di PKB, PBB, PAN, dan PPP memiliki *sense of participation* yang baik.

Persiapan-persiapan yang dilakukan menjelang pemilu di antaranya adalah memasang tanda gambar, poster, membagi-bagikan kaos ataupun atribut lainnya.

Kegiatan-kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi dominasi laki-laki. karena ternyata wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP juga ada yang melakukan. Bukti ini didapat dari PKB sebanyak 50% menyatakan sering, kadang-kadang 25% dan tidak pernah 25%. PBB yang menyatakan sering 50% dan kadang-kadang 50%. PAN 50% menyatakan sering kadang-kadang 25% dan tidak pernah 25%. PPP yang menyatakan sering 25% kadang-kadang 25% dan tidak pernah 50% Dari prosentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wanita muslim di PKB, PBB, dan PAN dalam memasang, membagikan atribut partai lebih baik dari PPP. Analisis yang muncul kemudian adalah karena mayoritas usia wanita muslim di PPP sudah di atas 45 tahun, maka untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut kurang memungkinkan lagi. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut lebih banyak didistribusikan kepada orang lain (kader muda PPP).

## 2. Partisipasi dalam Internal Organisasi

Partisipasi wanita muslim dalam internal organisasi di PKB, PBB, PAN, dan PPP, terfokus pada empat poin pertanyaan. Hasil yang diperoleh sebagaimana dalam penyajian data bahwa, keaktifan wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP dalam menghadiri rapat organisasi, yang menyatakan sering prosentasenya lebih besar. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mereka untuk mengikuti rapat sangat baik. Keseriusan dan perjuangan wanita muslim untuk benar-benar *all out* dalam berorganisasi terbukti dalam penelitian ini. Dengan menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh organisasi wanita muslim akan lebih mengetahui persoalan-persoalan yang hendak dipecahkan dalam organisasi. Wanita inuslim tidak cukup hanya mendengar dari anggota lain yang hadir dalam rapat organisasi.



Kehadiran mereka dalam rapat organisasi tidak hanya sekedar duduk dan diam, akan tetapi mereka juga mengajukan usul dalam rapat tersebut. Wanita muslim yang sering mengajukan rapat dalam organisasi di antaranya; wanita muslim di PKB dengan jumlah 62,5%, PBB 50%, PAN 62,5%, dan PPP 62,5%. Hasil tersebut menginformasikan bahwa pada saat rapat organisasi wanita-wanita muslim di parpol tersebut sebagian besar bukan tipe wanita yang pemalu dan mengiyakan segala keputusan organisasi. Mereka tergolong wanita-wanita yang aktif untuk menyuarakan keinginan mereka dan keinginan mayoritas wanita dalam rapat organisasi. Ini juga didukung wawancara sebagaimana yang peneliti paparkan dalam bab III.

Selanjutnya, perjalanan organisasi ditentukan oleh jumlah dana yang dimiliki organisasi tersebut. Wanita muslim tidak dapat menggabungkan hidupnya dengan aktif di organisasi, karena organisasi politik bukan organisasi profit maka wajar saja kalau sumber dana untuk aktivitas organisasi diperoleh dari simpatisan antar kader organisasi. Wanita muslim sebagai anggota atau bagian organisasi tersebut juga berhak untuk memberikani sumbangan materiil bagi kelangsungan hidup partai. Sumbangan yang diberikan wanita muslim di partai tersebut mengindikasikan tingkat partisipasi mereka dalam internal partai, hasil yang tersaji dalam bab III pada sub bahasan partisipasi wanita muslim dalam memberikan bantuan materi terhadap partai menunjukkan bahwa partisipasi wanita muslim di PKB, PAN, dan PPP sangat baik dengan prosentase 62,5%. Sedang wanita muslim di PBB hanya 25% yang menyatakan sering memberi. Tingkat partisipasi yang rendah pada wanita muslim di PBB, kemungkinannya karena wanita muslim di PBB sebagian besar wanita

muda yang tingkat ekonominya masih pas-pasan dan juga sebagian besar mereka belum berkeluarga.

Dalam membicarakan persoalan-persoalan organisasi tidak jarang ada perbedaan pendapat antar anggota organisasi tersebut. Sikap tidak setuju atau setuju terhadap keputusan organisasi tidak selalu dilontarkan sendiri, akan tetapi terkadang sikap tersebut disalurkan melalui anggota lain, Atau bahkan mempengaruhi anggota lain untuk menyatakan sikap yang sama dengan keinginannya. Sikap mempengaruhi anggota lain dalam pembuatan keputusan di organisasi bagi wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP yang menyatakan sering sebanyak 37,5%, yang menyatakan kadang-kadang PKB dan PPP 37,5% PBB 62.5%. PAN 25%. Pernyataan tidak pernah dinyatakan wanita muslim PBB dan PPP 25% PAN 37,5%. Perbandingan di atas menunjukkan bahwa tingkat independensi wanita muslim dalam menyatakan sikap terhadap pembuatan keputusan di organisasi masih sangat rendah. Prosentase yang menunjukkan tingkat independensinya yang tinggi adalah wanita di PAN yang memperoleh jumlah 37,5%. Sedang wanita di PBB tingkat independensinya masih sangat rendah.

### 3. Partisipasi dalam Eksternal Organisasi

Empat pertanyaan untuk mengetahui tingkat partisipasi wanita muslim di eksternal organisasi, pertama, tentang tingkat keseringan wanita muslim mengajukan usul pada pemerintah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi yang

tinggi dalam hal tersebut adalah wanita muslim di PPP yang mencapai 50%, PAN 37,5% PBB 12,5%, dan PKB 25%.

Jumlah wanita muslim di PPP yang sering mengajukan usul kepada pemerintah lebih mendominasi partai lainnya merupakan kondisi yang wajar karena pada era sebelum multi partai wanita muslim PPP cukup banyak yang menjabat anggota DPRD selama beberapa periode. Lewat sarana-sarana di lembaga legislatif intensitas bertemu dengan pejabat pemerintah sangat memungkinkan. Pada momen-momen tersebut kesempatan untuk mengajukan usul pada pemerintah dapat dilakukan. Sedang rendahnya partisipasi wanita muslim di PBB yang menyatakan sering mengajukan usul kepada pemerintah karena belum adanya wanita muslim di PBB yang duduk sebagai anggota DPRD. Jadi kesempatan untuk berdialog lebih dekat dengan pemerintah belum dapat terlaksana. Meskipun demikian, tingkat partisipasi wanita muslim di PBB dalam mengajukan usul kepada pemerintah menunjukkan partisipasi sedang dengan jumlah prosentase 50% Sedang wanita muslim di PKB dan PAN tingkat partisipasi tinggi, sedang dan rendah seimbang.

Usulan-usulan yang diajukan wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP menunjukkan tingkat kepedulian mereka terhadap lingkungan sosial yang tinggi. Ada sebagian yang memperjuangkan kepentingan wanita dan sebagian lainnya memperjuangkan kepentingan pendidikan dan masyarakat pada umumnya.

Pertemuan dengan pejabat juga bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas dan peran wanita dalam memperjuangkan sesama. Jumlah wanita muslim di PKB dan PPP yang menyatakan sering melakukan pertemuan dengan pejabat

sebanyak 50%. Wanita muslim PBB dan PAN hanya 25% Partisipasi terendah wanita muslim di PAN dengan jumlah prosentase 37,5%. Tingginya partisipasi wanita muslim di PKB dan PPP karena kondisi yang lebih memungkinkan bagi dua organisasi politik ini untuk melakukan pertemuan dengan pejabat. Sebagaimana diketahui, jumlah wanita muslim yang di PKB yang masuk di jajaran anggota dewan sebanyak empat orang dan PPP kurang lebih 10 orang yang pernah masuk menjadi anggota legislatif.

Dalam mengajukan usul, 100 % wanita muslim di PBB, PKB, PAN, dan PPP tidak pernah melakukan praktek *money politics*. Hal yang demikian menunjukkan sikap yang positif di kalangan politisi wanita muslim. Kesadaran untuk melakukan praktek politik yang bersih tergambar dari sikap mereka yang tidak mau memanipulasi usulan dengan memberikan uang sebagai pelumasnya. Sikap ini juga didasari karena sebagai wanita muslim yang memiliki pemahaman keagamaan yang benar yang mengerti norma dan aturan agama termasuk pelarangan melakukan penyogokan.

Pada poin terakhir, tentang praktek provokasi yang sering dilakukan pada momen- momen tertentu agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, wanita muslim PKB dan PBB menyatakan sering 25%, kadang-kadang 50%, dan 25% menyatakan tidak pernah. Wanita muslim di PAN dan PPP yang menyatakan sering hanya 12,5% kadang-kadang 25%, dan tidak pernah 62,5%. Ini menunjukkan bahwa wanita muslim di PPP dan PAN mayoritas memiliki sikap yang tegas dalam menindaklanjuti masalah. Mereka tidak terbius oleh tindakan-tindakan spontan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Memang kebijakan pemerintah tidak

selamanya benar dan positif, akar tetapi untuk menentukan sikap tersebut wanita muslim di PAN dan PPP lebih mengedepankan dialog dengan pemerintah.

## BAB V

### KESIMPULAN

Partisipasi politik wanita muslim (PKB, PBB, PAN, PPP) di Surabaya ternyata sangat beragam. Keragamannya terlihat dari segi tawaran partisipasi wanita muslim dalam politik, faktor yang melatarbelakanginya, partisipasi dalam Pemilihan Umum, pada aktifitas internal organisasi, maupun eksternal organisasi. Iriti keragaman tersebut juga tidak terlepas dari kondisi pribadi wanita muslim yang berbasis pada *background* pendidikan, status ekonomi, maupun faktor usia mereka.

Pembahasan tesis ini telah sedikit banyak memberikan gambaran tentang partisipasi politik wanita muslim di Surabaya secara praksis dalam perspektif era multi partai khususnya pada partai politik PKB, PBB, PAN, dan PPP di DPW. Dari kajian penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran umum wanita muslim yang tercermin dalam empat partai politik tersebut bisa dijadikan anggapan umum bahwa jumlah wanita muslim yang terakomodir di partai maupun di lembaga legislatif masih sangat minim. Minimnya jumlah wanita muslim di Surabaya masih perlu pengkajian yang detail untuk mengetahui kondisi obyektif wanita muslim di partai politik tersebut. Latar belakang wanita muslim yang terlibat di PKB umumnya dari organisasi kemasyarakatan di bawah payung Nahdlatul Ulama'. Sementara wanita muslim yang aktif di PAN dan PBB mayoritas berbasis ormas *underbouw* Muhammadiyah. Sedang wanita muslim yang aktif di PPP sangat beragam, ada yang berasal dari unsur Muhammadiyah, NU, dan Muslimin Indonesia.

2. Program kegiatan rutin wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP untuk sementara belum sepenuhnya terealisasi. Hanya di PPP, sebelum reformasi meletus sempat merealisasikan kegiatan rutin arisan bulanan, yasinan, dan pengajian berkala . Untuk saat ini kegiatan-kegiatan rutin cS PPP belum ada. Sedang di PBB kegiatan yang sempat terealisasi adalah kegiatan pengajian dan rapat muslimat yang diselenggarakan dua kali seminggu.
3. Latar belakang pendidikan wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP umumnya lulusan Perguruan Tinggi. Kondisi ekonomi mereka juga termasuk berkecukupan walaupun ada sebagian kecil yang tergolong tingkat ekonominya biasa.
4. Tujuan dan faktor-faktor yang melatar-belakangi partisipasi politik wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP pada intinya sama. Tujuan mereka ingin meningkatkan peran dan fungsi wanita untuk dapat menjadi mitra sejajar pria di bidang politik. Faktor-faktor yang melatar-belakangi secara empirik sangat jelas, karena kondisi masyarakat Indonesia yang belum menghargai dan mengakui keberadaan dan kualitas wanita di kancah publik terutama terjadinya pemarginalan posisi wanita di semua tingkat pengambilan keputusan. Kebijakan politik jika tidak pernah memperhitungkan kepentingan wanita, wujud kongkrit yang ada adalah minimnya jumlah keterwakilan anggota legislatif dari wanita yang nota bene sebagai konstituen terbesar. Ada juga tujuan wanita muslim yang berbeda misalnya pada wanita muslim di PAN, bergabungnya sebagian wanita muslim di PAN untuk mengegolkan Bapak Amin Rais menjadi presiden. Faktor yang melatar belakangi karena kekaguman sebagian wanita muslim terhadap

sosok Amin Rais sebagai salah satu tokoh reformasi yang mampu menggulingkan Soeharto dari singgasana kepresidenannya, Perbedaan tujuan juga muncul di sebagian wanita muslim di PBB, tujuan yang dimaksud berawal dari adanya persepsi sebagian wanita muslim tersebut terhadap partai di luar PBB sebagai partai non Islam (sekuler), sehingga apresiasi sikap politik sebagai muslim sejati menurut mereka lebih pas jika disalurkan di PBB yang mengemban misi Islam. Jadi tujuan sebagian mereka untuk syi'ar Islam di bumi Indonesia melalui PBB.<sup>5</sup> Tingkat partisipasi politik wanita muslim di PKB,

5. PBB, dan PAN dalam Pemilihan Umum secara umum tingkat partisipasinya tinggi.

Wanita muslim di PPP juga demikian, hanya pada poin partisipasinya dalam pemasangan atribut partai menjelang pemilu tingkat partisipasinya rendah.

6. Tingkat partisipasi politik wanita muslim dalam internal organisasi pada dasarnya tingkat partisipasi mereka tinggi. Hanya pada poin memberikan bantuan materi pada organisasi dan sikap mempengaruhi anggota lain dalam pembuatan keputusan organisasi tingkat partisipasi wanita muslim PBB sebatas tingkatan sedang.

7. Tingkat partisipasi politik wanita muslim di eksternal organisasi (loby dan kontak khusus pejabat dan pemerintah), tingkat partisipasi wanita muslim PPP dalam mengajukan usul pada pemerintah tingkat partisipasinya lebih tinggi dari partai lainnya. Urutan prosentase tingkatan partisipasi yang tinggi adalah wanita muslim PPP mencapai 50%, PAN 37,5%, PKB 25%, dan PBB 12,5%. Intensitas bertemu dengan pejabat prosentase tertinggi adalah wanita muslim PKB dan PPP dengan jumlah prosentase masing-masing 50%. Sedang wanita



muslim PAN dan PBB mencapai 25%. Praktek *money politics* dalam memperiancar usulan terhadap pemetintah 100% tidak pernah dilakukan wanita muslim di PKB, PBB, PAN, dan PPP. Pada praktek provokasi terhadap isu yang berkembang yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintali partisipasi terendah dilakukan wanita muslim PAN dan PPP dengan jumlah prosentase 62,5% untuk partisipasi tingkatan sedang banyak dilakukan wanita muslim PKB dan PBB dengan jumlah prosentase 50%.

## BIBLIOGRAPHY

- A Badawi, Gamal. "Women in *Islam*" dalam *Islam Its Meaning and Message*, ed. Hursid Ahmad. London: The Islamic Foundation, 1976.
- Al-Afghani Said. *A'ishah wa al-Siyasah*. Beirut Dar al-Fikr, 1971.
- A Sabbah, Fatna. *The Women in the Muslim Unconscious*. t.t Pergamon Press, 1984.
- Axford, Banie et. al, *Politics: An Introduction*. London, Routledge, 1997.
- Closky, Herbert Mc "*Political Participation*" dalam Partisipasi dan Partai Politik. ed. Miriam Budiarjo. Jakarta: PT. Gramerlia, 1981.
- Dhaquq, Ibrahim. *Al-Nisa' al-Hakimat fi al-Tarih*. Bagdad: Al-Matba'ah al-Sa'dun, 1973.
- Departemen Agama, *Ensildopedi Islam*, JiL II. Jakarta: t p., 1993.
- \_\_\_\_\_. *AI-Qur 'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI, 1987.
- Easton, David. *Proses Politik*, ter. Priatmoko. Surabaya: Frsip Unair, t.t.
- Huntington, Sanrue P. dan Nelson, Joan M. *No Essay Choice: Political Participation in Development Countries*. Cambridge: Havard University Press, 1977.
- KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: B dai Pustaka, 1.1
- Jawa Pos. *PPP Putuskan Capres Harus Putra Indonesia Islam*. 16 Juni 1999.
- \_\_\_\_\_. *PKB Bentuk Tim Bahas Presiden Wanita*, 16 Juni 1999.
- Macdonald, Mandy. et.al. *Gender and Organizational Change; Bridging the Gap between Policy and Practice*. Amsterdam: Royal 'IYopical Institute, 1997.
- Mcrrnissi, Fatima. *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Wanita dalam Sejarah Muslim*. Ter. Rahniani Astuti. Bandung: Mizan, 1999.